

Permasalahan :

- a. Belum meratanya penyebaran ASN yang berkualitas untuk mendukung tugas dan fungsi DPRD; dan
- b. Tingginya mobilitas DPRD yang tidak diimbangi kecepatan pengadministrasian kegiatan terkadang belum bisa diukur sebagai capaian kinerjanya.

Solusi :

- a. Meningkatkan koordinasi di semua lini untuk meningkatkan kapasitas ASN yang mengelola barang dan jasa daerah; dan
- b. Membangun basis data terpadu, untuk mempercepat terwujudnya ASN yang berintegritas dan kompetitif untuk melaksanakan program dan kegiatan berbasis kinerja.

12. Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah;

Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien dicerminkan ke dalam 3 (tiga) pilar yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Sehingga kelihatan, sejauh mana faktor kontribusi masyarakat turut andil menyelesaikan masalah agar ruang demokrasi tumbuh dan berkembang. Ukuran Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien diukur pada saat rencana disusun, sejauh mana data dan informasi dipakai sebagai *road map* untuk menyusun sasaran strategis yang hendak dicapai, juga sejauh mana konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran dapat terlaksana dengan tepat waktu dan manfaat.

Adapun capaian sasaran "Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah" sebagaimana Tabel 3.36.

Tabel 3.36.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Tingkat Konsistensi dan ketepatan waktu Perencanaan	71	100	95	95	90	99,54

Perencanaan pembangunan wajib berbasis data dan informasi pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga sesuai dengan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dijelaskan bahwa RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) memuat kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun dari sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat harus didukung **data dan informasi pelaksanaan pembangunan**.

Memperhatikan ketentuan di atas, perencanaan pembangunan daerah harus didukung **base line data dan informasi pembangunan** yang akurat, dan tepat manfaat. Dukungan semua pihak untuk mewujudkan perencanaan yang tepat waktu dan manfaat, serta untuk menjaga konsistensi antar dokumen rencana sangat dibutuhkan sekaligus sebagai upaya kita mendukung terwujudnya masyarakat Klaten yang **Maju, Mandiri dan Berdaya Saing**.

13. Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Arsip SKPD;

Upaya Pemerintah kabupaten dalam meningkatkan tata kelola Arsip SKPD dengan melakukan berbagai perbaikan sarana dan prasarana kearsipan, dan peningkatan pengelolaan arsip secara terpadu. Langkah ini diharapkan akan meningkatkan tata kelola Arsip. Adapun capaian sasaran Meningkatnya Tata Kelola Arsip SKPD disajikan pada Tabel 3.37.

Tabel 3.37.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Persentase kenaikan SKPD mengelola arsip secara baku	5	5	11,72	234,4	25	46,88

Pengelolaan kearsipan sebagai bagian dari aset Pemerintah daerah dilihat dari jumlah arsip yang tercatat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Pada Tahun 2014 sebanyak 71.161 arsip, dan pada Tahun 2018 sudah mencapai 87.625 arsip. Gambaran pengelolaan kearsipan di Kabupaten Klaten pada Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel 3.38.

Tabel 3.38.

Pengelolaan Kearsipan di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Arsip	Jumlah	71.161	68.700	74.700	78.434	87.625

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kab. Klaten, 2018

Berdasarkan Tabel 3.38. sebagaimana tersebut di atas, Pelayanan arsip untuk OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten diharapkan dapat berkembang kearah arsip digital, sehingga akan lebih memudahkan dalam pencarian arsip. Dengan semakin meningkatnya jumlah koleksi arsip dan semakin mutakhirnya pengelolaan kearsipan akan menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung perpustakaan, sehingga bisa meningkatkan jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan Daerah.

14. Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Profesional, Transparan dan Akuntabel;

Pemerintahan Desa sebagai penyelenggara Pemerintahan terdepan memerlukan peningkatan standar pelayanan dalam hal: pemberdayaan masyarakat, menjaga adat-istiadat, serta melayani kebutuhan administrasi penduduk. Upaya Pemerintah kabupaten dalam **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Profesional, Transparan dan Akuntabel** dengan melakukan berbagai peningkatan partisipasi, dan penyempurnaan regulasi tentang desa. Langkah ini diharapkan akan meningkatkan tata kelola Pemerintahan Desa yang Profesional, Transparan dan Akuntabel. Adapun capaian sasaran "Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Profesional, Transparan dan Akuntabel" disajikan pada Tabel 3.39.

Tabel 3.39.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Profesional, Transparan
dan Akuntabel

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Persentase penyelenggaraan Pemerintah desa yang profesional, transparan dan akuntabel	15	46	48	104	100	48

Program pemberdayaan masyarakat untuk mendorong kemandirian desa dan menanggulangi kemiskinan dilaksanakan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Pasar Desa.

Jumlah BUMDes dalam kurun waktu Tahun 2013-2014 masih relatif rendah karena belum adanya dukungan dana desa dan komitmen Pemerintah Desa, peningkatan mulai terlihat pada Tahun 2015 ketika dana desa mulai diberikan kepada Pemerintah Desa serta ditunjang dengan adanya komitmen dari Pemerintah Desa yang tinggi. Dari 215 BUMDes yang ada di Kabupaten Klaten saat ini, diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) kategori berdasarkan Peraturan Gubernur No. 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan BUMDesa Provinsi Jawa Tengah yaitu: 1. BUMDes Dasar sejumlah 85; 2. BUMDes Tumbuh sejumlah 112; 3. BUMDes Berkembang sejumlah 24; dan 4. BUMDes Maju sejumlah 5.

Guna pengembangan dan optimalisasi pengelolaan BUMDes maka, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melakukan pendampingan kepada pengelola BUMDes dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Perkembangan lembaga ekonomi Pedesaan tahun 2014–2018 disajikan pada Tabel 3.40.

Tabel 3.40.

Lembaga Ekonomi Perdesaan

Tahun	Jumlah BUMDes	Jumlah Pasar Desa	Pasar Desa Dikelola oleh Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
2014	34	40	5
2015	63	40	5
2016	141	40	5
2017	217	40	5
2018	224	40	5
Jumlah	224	40	5

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2019.

Berdasarkan Tabel 3.40. sebagaimana tersebut di atas, Lembaga ekonomi perdesaan lainnya (Pasar Desa) juga dituntut dapat memberikan kontribusi positif di dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Peran pasar desa belum maksimal karena otoritas manajemen pengelolaan pasar desa belum diberikan sepenuhnya kepada Desa dan masih dikelola oleh Pemerintah Daerah. Hal ini perlu adanya komunikasi dari pihak terkait dalam rangka menyelesaikan permasalahan tersebut, lebih lanjut diharapkan adanya keberpihakan terhadap APBDes dalam rangka pengembangan Pasar Desa.

Pelatihan teknologi tepat guna di perdesaan dari kurun waktu tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 3.41.

Tabel. 3.41.

Pelatihan Teknologi Tepat Guna Tahun 2014-2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jenis Pelatihan TTG yang telah diberikan	1. Pelatihan Pembuatan Aneka Kripik bahan Singkong Pemanfaatan TTG di Desa Kalikotes dengan peserta dari semua desa se Kec. Kalikotes masing desa sebanyak 5 (lima) orang	1. Pelatihan Ternak Lele dengan metode Bioflock Pemanfaatan TTG di Desa Drono peserta dari Desa Drono, Tempursari, Desa Ngawen Kec. Ngawen Desa Wiro Kec. Bayat Desa Ngawonggo Kec. Ceper	1. Pelatihan Pembuatan Aneka Kripik bahan Singkong Pemanfaatan TTG di Desa Bono peserta dari Desa Bono, Pucangmiliran dan Wunut Kec. Tulung	1. Pelatihan Hidroponik Pemanfaatan TTG di Desa Bawukan peserta dari Desa Bawukan dan Desa Panggang Kecamatan Kemalang 2. Pelatihan Ternak Lele dengan metode Bioflock Pemanfaatan TTG di Desa Gunung Gajah peserta dari Desa Kebon dan Desa	1. Pelatihan pembuatan Briket orang dengan bahan sampah organik di desa Solodiran, Kec Manisrenggo 2. Pelatihan pembuatan Briket orang dengan bahan sampah organik di desa Kranggan, Kec Manisrenggo 3. Pelatihan pembuatan Briket orang dengan bahan sampah organik di

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
					Gununggajah, Bayat 3 Pelatihan Hidroponik Pemanfaatan TTG di Desa Sidowayah peserta dari Desa Sidowayah dan Desa Kebonharjo Kecamatan Polanharjo	desa Taskombang, Kec Manisrenggo 4. Pelatihan pembuatan Briket orang dengan bahan sampah organik di desa Nangsri, Kec Manisrenggo
2.	Data Perkembangan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dipedesaan	1. Posyantek Kec. Kalikotes	1. Posyantek Kec. Ngawen	1. Posyantek Kec. Kemalang 2. Posyantek Kec. Tulung	1. Posyantek Kec. Karanganom (Keputusan Bupati Klaten No. 414.4/213 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola POSYANTEK Kec. Karanganom Kab. Klaten) 2. Posyantek Kec. Polanharjo (Keputusan Bupati Klaten No. 414.4/214 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola POSYANTEK Kec. Polanharjo Kab. Klaten)	1. Posyantek antar desa TA 2018 di Kec. Cawas, Kec. Wedi

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2019.

Berdasarkan Tabel 3.41. sebagaimana tersebut di atas, mekanisme penerapan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) di Kabupaten Klaten, diawali dengan sosialisasi kepada seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Klaten (26 Kecamatan), kemudian proses pembentukan Teknologi Tepat Guna (TTG) dipilih pada kecamatan yang memiliki potensi untuk dikembangkan.

Data yang tersaji dalam pengembangan kawasan perdesaan hanya ada pada Tahun 2016 dan 2017, dikarenakan kegiatan pengembangan kawasan perdesaan ini baru dimulai pada Tahun 2016. Pada Tahun 2016 hanya ada 1 data pengembangan kawasan pedesaan yaitu pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Mandiri Pangan di Desa Kaligayam, Desa Kadilanggon, dan Desa Melikan di Kecamatan Wedi. Pengembangan kawasan perdesaan tersebut sudah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh desa, Penempatan

lokasi tersebut di dasarkan pada hasil penelitian Universitas Tidar Kabupaten Magelang. Sedangkan pada Tahun 2017 pengembangan kawasan desa ada 5 data pengembangan kawasan pedesaan dan masih dalam proses penyusunan RPKP, yaitu:

- 1). Pengembangan kawasan desa sentra batik di Desa Jarum, Banyuripan, Beluk dan Kebon di Kecamatan Bayat. Pengembangan kawasan desa batik tersebut telah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh desa-desa tersebut sebagai sentra penghasil batik di Kabupaten Klaten.
- 2). Pengembangan kawasan desa industri lurik dan pertanian organik di Desa Tlingsing, Mlese, Balak dan Baran di Kecamatan Cawas. Pengembangan kawasan desa industri lurik dan pertanian organik tersebut sudah sesuai dengan potensi yang dimiliki desa.
- 3). Pengembangan kawasan desa wisata budaya berbasis ekonomi di Desa Taskombang, Solodiran, Kranggan, dan Nagsri di Kecamatan Manisrenggo. Pengembangan kawasan desa wisata budaya berbasis ekonomi tersebut sudah sesuai dengan potensi yang dimiliki desa.
- 4). Pengembangan kawasan desa wisata alam lereng merapi di Desa Balerante, Sidorejo, dan Bumiharjo di Kecamatan Kemalang. Pengembangan kawasan desa wisata alam lereng merapi tersebut sudah sesuai dengan potensi desa yang terletak di lereng gunung merapi. Rician pengembangan lokasi desa wisata disajikan pada Tabel 3.42.

Tabel 3.42.

Lokasi Pengembangan Wisata

Tahun	Nama / Tema Kawasan	Lokasi	Tahap Kegiatan	Keterangan
2016	Kawasan Perdesaan Berbasis Mandiri Pangan	Kecamatan Wedi : Ds. Kaligayam, Ds. Kadilanggon, Ds. Melikan	Sudah menyusun RPKP	SK Bupati No. 050/221 Tahun 2016 tentang Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Mandiri Pangan di Kabupaten Klaten
2017	Kawasan Sentra Batik	Kecamatan Bayat : Ds. Jarum, Ds. Banyuripan, Ds. Beluk, Ds. Kebon	Proses penyusunan RPKP	SK Bupati No. 050/467 Tahun 2017 tentang Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Klaten
	Kawasan Sentra Industri Lurik dan Pertanian Organik	Kecamatan Cawas : Ds. Tlingsing, Ds. Mlese, Ds. Balak, Baran	Proses penyusunan RPKP	SK Bupati No. 050/467 Tahun 2017 tentang Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Klaten

Tahun	Nama / Tema Kawasan	Lokasi	Tahap Kegiatan	Keterangan
	Kawasan Wisata Budaya Berbasis Ekonomi	Kecamatan Manisrenggo : Ds. Taskombang, Ds. Solodiran, Ds. Kranggan, Ds. Nangsri	Proses penyusunan RPKP	SK Bupati No. 050/467 Tahun 2017 tentang Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Klaten
	Kawasan Wisata Alam Lereng Merapi	Kecamatan Kemalang : Ds. Balerante, Ds. Sidorejo, Ds. Bumiharjo	Proses penyusunan RPKP	SK Bupati No. 050/467 Tahun 2017 tentang Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Klaten
Jumlah	5 kawasan			

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2019.

Berdasarkan Tabel 3.42 sebagaimana tersebut di atas, ada 5 (lima) kawasan dengan desa sebanyak 17 (tujuh belas) desa pengembangan pengembangan desa wisata masing-masing ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati.

15. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien biasanya dicerminkan ke dalam 3 (tiga) pilar yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Sehingga kelihatan, sejauh mana faktor kontribusi masyarakat turut andil menyelesaikan masalah agar ruang demokrasi tumbuh dan berkembang. Ukuran Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien diukur pada saat rencana disusun, sejauh mana data dan informasi dipakai sebagai *road map* untuk menyusun sasaran strategis yang hendak dicapai, juga sejauh mana konsistensi antar dokumen perencanaan saling menguatkan, sehingga *output*, *outcome* dan *benefit* akan kelihatan progres capaiannya.

Adapun capaian sasaran "Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah" sebagaimana Tabel 3.43.

Tabel 3.43.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Level Maturitas SPIP	1	2	2	100	3	66,67
2	Level Kapabilitas APIP	2	3	2	66,67	3	66,67
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	47,89(C)	64 (B)	60,33 (B)	94,27	70 (B)	60,33 (B)

1. Level Maturitas Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)

Kapabilitas APIP ditingkatkan untuk memastikan dan mengurangi terjadinya penyimpangan/penyelewengan atas tujuan yang akan dicapai melalui Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP). Level Maturitas SPIP Kabupaten Klaten berada di level 2 berdasarkan hasil Penjaminan Kualitas atas pelaksanaan penilaian maturitas level SPIP di Kabupaten Klaten tanggal 12 Maret 2018 oleh Tim Penjamin Kualitas dari Badan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DIY. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Peningkatan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor LQAPIP-142/PW12/6/2018 Tanggal 21 Juni 2018, Inspektorat Kabupaten Klaten disimpulkan bahwa Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Klaten berada pada level 2 (*insfrastructure*).

2. Level Maturitas SPIP

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah. Maturitas SPIP terdiri dari 5 tingkatan yaitu:

1. Level 0 (belum ada), Belum memiliki kebijakan dan prosedur;
2. Level 1 (Rintisan), Ada praktik pengendalian intern – ada kebijakan dan prosedur tertulis, namun masih bersifat *ad-hoc* dan tidak terorganisasi dengan baik. Tanpa komunikasi dan pemantauan;

3. Level 2 (Berkembang), Ada praktik pengendalian intern tapi tidak terdokumentasi dengan baik. Pelaksanaan tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi.
4. Level 3 (Terdefinisi), Ada praktik pengendalian intern yg terdokumentasi dengan baik. Evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.
5. Level 4 (Terkelola & Terukur), Ada praktik pengendalian internal yang efektif. Evaluasi formal dan terdokumentasi.
6. Level 5 (Optimum), Menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan. Pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer

Kabupaten Klaten menetapkan target pada tahun 2018 mencapai tingkat maturitas SPIP level 2 (dua). Target tersebut telah tercapai dengan baik pada tahun 2018 karena berdasarkan penilaian telah terdapat pengendalian intern walaupun belum terdokumentasi dengan baik. Penilaian Maturitas SPIP dilakukan dua tahap yaitu penilaian mandiri oleh Inspektorat dan kemudian dilakukan *Quality Assurance* (kendali mutu) oleh tim dari Badan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DIY. Penilaian mandiri telah dilakukan pada akhir tahun 2017 dan kemudian dilakukan kendali mutu oleh BPKP DIY pada awal tahun 2018 dengan nilai akhir 2,29. Penilaian mandiri dilakukan kembali pada akhir tahun 2018 dengan nilai 3,35 kemudian direviu oleh BPKP DIY dengan nilai 3,15, Namun demikian nilai akhir masih menunggu hasil *Quality Assurance* dari BPKP Pusat.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat pada tahun 2018 dalam mencapai target maturitas SPIP Level 2 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan *awareness* di jajaran kepala OPD, Inspektorat telah menyelenggarakan rapat dengan mengundang Kepala BPKP Perwakilan DIY dengan tujuan menekankan urgensi SPIP sebagai instrumen pencegah *fraud* dan pengawal tujuan organisasi.
2. Pendampingan/Asistensi terhadap seluruh OPD dalam penyelenggaraan SPIP terutama dalam penyusunan register risiko dan rencana tindak pengendaliannya.
3. Menyelenggarakan pelatihan peningkatan maturitas SPIP bekerjasama dengan BPKP Perwakilan DIY.
4. Diskusi strategi peningkatan Maturitas SPIP dalam rangka peningkatan integritas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

5. Mendorong pembentukan tim satgas implementasi SPIP di OPD.
6. Meningkatkan Peran APIP yang Efektif antara lain dengan upaya:
 - a. Program pengawasan berbasis risiko. Sebelum melakukan audit ke objek pengawasan dilakukan terlebih dahulu evaluasi manajemen risiko terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh objek pengawasan.
 - b. Inspektorat Kabupaten Klaten telah menyusun audit program untuk audit operasional yang bertujuan untuk ekonomis, efisiensi dan efektifitas kegiatan, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, tugas dan fungsi kepegawaian, pendapatan dan investigasi, reviu LKPD, Reviu LKjIP.
 - c. Inspektorat Kabupaten Klaten telah melakukan telaah sejawat dengan Inspektorat Kabupaten Sukoharjo sebagaimana Laporan Nomor: 700/61.a/2018 Tanggal 10 Juli 2018. Atas saran perbaikan dalam Laporan telaah sejawat ini telah dilakukan tindak lanjut sesuai Surat Inspektur Kabupaten Klaten Nomor 045/514/11 Tanggal 12 November 2018 hal Tindak Lanjut atas Hasil Telaah Sejawat pada Inspektorat Kabupaten Klaten

3. **Level Kapabilitas APIP**

Kapabilitas APIP ditargetkan pada tahun 2018 mencapai level 3 (tiga), namun demikian realisasinya baru mencapai level 2. Sama dengan Penilaian Maturitas SPIP, Penilaian tingkat kapabilitas APIP dilakukan dua tahap yaitu penilaian mandiri oleh Inspektorat dan kemudian dilakukan *Quality Assurance* (kendali mutu) oleh tim dari Badan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DIY. Penilaian Mandiri atas kapabilitas APIP di Kabupaten Klaten telah dilakukan sebanyak dua kali. Penilaian mandiri pertama dilakukan pada bulan April 2018 dan penilaian mandiri kedua dilakukan pada Bulan November 2018. Atas penilaian mandiri pertama telah dievaluasi oleh BPKP DIY dengan hasil penilaian Inspektorat Kabupaten Klaten mencapai level 2 (dua). Penilaian Mandiri tingkat Kapabilitas APIP yang diselesaikan tanggal 13 November 2018 telah menunjukkan bahwa Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Klaten telah mencapai level 3 (tiga), namun demikian hasil evaluasi (*quality Assurance*) sampai akhir tahun 2018 belum tersusun laporan.

Peningkatan Level Kapabilitas APIP ini dilakukan dengan menggunakan model yang dikembangkan oleh Insititute of Internal Auditor (IIA) Research Foundation yaitu Internal Audit Capability Model (IA-CM). Model Kapabilitas Pengawasan Intern atau Internal Audit Capability Model (IA-CM) adalah suatu kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik. IA-CM dimaksudkan sebagai

model universal dengan perbandingan sekitar prinsip, praktik, dan proses yang dapat diterapkan secara global untuk meningkatkan efektivitas pengawasan intern. Terdapat 6 (enam) elemen yang dinilai dari model tersebut yaitu Peran dan Layanan ; Pengelolaan Sumber Daya Manusia ; Praktik Profesional ; Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja ; Budaya dan Hubungan Organisasi ; serta Struktur Tata Kelola.

4. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Tuntutan akuntabilitas kinerja Pemerintah merupakan kewajiban Pemerintah yang harus bisa diwujudkan untuk mempertanggung-jawaban mandat yang telah diberikan dalam mengelola urusan penyelenggaraan Pemerintah. Sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 mengupayakan pentingnya Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih yang dijabarkan ke dalam arah kebijakan pembangunan daerah dengan Meningkatkan efektivitas organisasi Pemerintah Daerah yang peka terhadap permasalahan dan perubahan lingkungan internal maupun eksternal, dan Mewujudkan tata Pemerintahan yang efektif dan efisien.

Capaian kinerja telah menunjukkan hasil yang meningkat. Target yang ditetapkan pada tahun 2018 dengan nilai 64, namun terealisasi 60,33 (dengan Kategori B). Perolehan skor 60,33 dengan kriteria sedang.

Berdasarkan penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terdapat beberapa ikhtisar penting terkait penilaian kinerja instansi Pemerintah di Kabupaten Klaten, diantaranya:

1. Pemerintah Kabupaten Klaten memperoleh nilai 60,33 atau dengan predikat B. Secara rinci hasil penilaian tersebut, sebagai berikut:
 - Perencanaan kinerja nilai 19,94
 - Pengukuran kinerja nilai 14,83
 - Pelaporan kinerja nilai 9,43
 - Evaluasi kinerja nilai 5,74
 - Capaian kinerja nilai 10,39
2. Nilai ini merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Klaten.
3. Pemerintah Kabupaten Klaten telah membangun akuntabilitas kinerja di semua jenjang Pemerintahan dengan menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang mencakup: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja.

4. Secara umum atas kinerja Pemerintah Kabupaten Klaten adalah baik, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk perbaikan ke depan, agar kinerja pada instansi Pemerintah terus mengalami peningkatan.

Langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan guna meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja, adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan, dengan langkah-langkah;
 - a). Mereviu dokumen perencanaan untuk melihat ketepatan dan sinkronisasi antara tujuan, sasaran, indikator kinerja untuk mencapai target pembangunan jangka menengah dan panjang daerah.
 - b). Memperbaiki dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja sesuai dengan hasil reviu sebagai acuan penyusunan anggaran dengan menyusun agenda aksi daerah.
- b. Memperbaiki kualitas pengukuran kinerja melalui langkah-langkah;
 - a). Menerapkan sistem pengukuran kinerja secara konsisten, dan sebagai bahan penilaian kinerja lembaga/pejabat, sekaligus sebagai pengendalian rencana.
 - b). Memastikan penerapan dan penetapan Perjanjian Kinerja secara berjenjang mulai eselon II, III sampai pada tingkatan eselon IV.
- c. Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja terhadap OPD, serta kualitas evaluasi program; dan
- d. Melakukan pengendalian dan evaluasi secara berjenjang terhadap capaian kinerja baik di tingkat kabupaten maupun OPD sebagai dasar penerapan pemberian *reward and punishment* dalam rangka semakin mendorong terciptanya manajemen berbasis kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2018, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah terdiri dari 3 (tiga) program, diantaranya:

1. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;
2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Tata Laksana Perangkat Daerah; dan
3. Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan

Permasalahan :

1. Tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal dari Audit yang belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi atas LHP yang telah diterbitkan dalam menindaklanjuti hasil temuan.
2. Terbatasnya jumlah sumber daya aparatur pengawas/auditor.
3. Masih adanya ketidaktertiban pengelolaan barang daerah oleh OPD pengelola.

Solusi :

1. Penguatan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal dengan pembuatan regulasi, sosialisasi, koordinasi intensif, serta penguatan komitmen auditor dalam melaksanakan penyelesaian tindak lanjut pengawasan.
2. Mengajukan formasi auditor dan mengirimkan diklat fungsional/substantif ke lembaga diklat yang berkompeten.
3. Penguatan komitmen seluruh kepala OPD dalam penerapan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kedepan akan terus diupayakan langkah-langkah guna mempertahankan opini WTP, dengan penguatan komitmen semua sepihak, baik pimpinan maupun pejabat fungsional umum Kabupaten Klaten untuk mempertahankan opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten.

16. Sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;

Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien bisanya dicerminkan ke dalam 3 (tiga) pilar yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Sehingga kelihatan, sejauh mana faktor kontribusi masyarakat turut andil menyelesaikan masalah agar ruang demokrasi tumbuh dan berkembang. Ukuran Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien diukur pada saat rencana disusun, sejauh mana data dan informasi dipakai sebagai *road map* untuk menyusun sasaran strategis yang hendak dicapai, juga sejauh mana konsistensi antar dokumen perencanaan saling menguatkan, sehingga *output*, *outcome* dan *benefit* akan kelihatan progres capaiannya.

Adapun capaian sasaran "Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah" sebagaimana Tabel 3.44.

Tabel 3.44.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	2,6	2,9	3,09	106,55	3,1	3,09

Catatan: kondisi akhir capaian RPJMD disamakan dengan kondisi tahun 2018 mengingat angka riel yang mengeluarkan Mendagri.

Dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016–2021 telah ditetapkan adanya kebijakan daerah untuk : Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih yang dijabarkan ke dalam arah kebijakan pembangunan daerah dengan Meningkatkan efektivitas organisasi Pemerintah Daerah yang peka terhadap permasalahan dan perubahan lingkungan internal maupun eksternal, dan mewujudkan tata Pemerintahan yang efektif dan efisien.

Capaian EKPPD (Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah) Kabupaten Klaten tahun 2018 dengan skor 3,09 tergolong sangat tinggi, dan perolehan skor ini apabila dirangking untuk tingkat Provinsi Jawa Tengah menduduki posisi 23 (dua puluh tiga) dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Ke depan untuk memperbaiki peringkat EKPPD diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Peningkatan koordinasi secara lebih intensif dengan sesama OPD (Organisasi Perangkat Daerah).
- b. Melakukan pendampingan/desk dengan OPD dalam mengisi format EKPPD.
- c. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Tim Daerah (BPKP dan Inspektorat).

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2018, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan otonomi daerah terdiri dari 6 (enam) program, diantaranya:

1. Peningkatan Kinerja Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
2. Peningkatan Kerjasama Daerah;
3. Pengembangan Wilayah Perbatasan;

4. Peningkatan Tata Kelola Kecamatan;
5. Pengembangan Komunikasi Informatika Mass Media; dan
6. Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah..

Permasalahan :

- a. Masih adanya kendala pengumpulan data dan pengukuran data kinerja secara akurat dan cepat;
- b. Masih terbatasnya kemampuan SDM perencana dan pelaporan di jajaran OPD untuk mempercepat terwujudnya Pemerintahan yang kredibel,

Solusi :

- a. Meningkatkan koordinasi di semua lini untuk meningkatkan kapasitas OPD;
- b. Membangun basis data terpadu, untuk mempercepat pengukuran kinerja dan mengambil tindakan/intervensi tepat waktu apabila diperlukan.

17. Sasaran Meningkatnya Koordinasi Penataan Peraturan Perundang Undangan serta Bantuan Hukum dan HAM;

Untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya koordinasi penataan peraturan perundang undangan serta bantuan hukum dan HAM sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Klaten diukur dengan indikator persentase tercapainya penyusunan produk hukum dan penanganan perkara, dan Indeks Kabupaten Peduli HAM.

Adapun capaian sasaran Meningkatnya Koordinasi Penataan Peraturan Perundang-Undangan serta Bantuan Hukum dan HAM sebagaimana Tabel 3.45.

Tabel 3.45.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Koordinasi Penataan Peraturan Perundang-Undangan serta
Bantuan Hukum dan HAM

No	Indikator Kinerja	Capaian Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Persentase tercapainya penyusunan produk hukum dan penanganan perkara	80	85	90	105	90	100
2	Indeks Kabupaten Peduli HAM	0	75	234	175,5	80	292,50

1. Persentase tercapainya penyusunan produk hukum dan penanganan perkara

Pada tahun 2018 direncanakan sebanyak 94 Produk Hukum Daerah, dengan perincian: sebanyak 30 Peraturan Daerah, dan 64 Peraturan Bupati. dibahas tepat waktu, namun hanya terealisasi sebanyak 36 Produk hukum Daerah yang dibahas tepat waktu (atau 90%). Jumlah perkara yang ditangani sebanyak 4 perkara.

2. Indeks Kabupaten Peduli HAM

Penghargaan atas martabat manusia adalah hak setiap warga negara yang wajib diberikan negara. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Klaten dalam menjamin hak setiap warga negara diukur dari Indeks Kabupaten Peduli HAM.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran “Meningkatnya Koordinasi Penataan Peraturan Perundang-Undangan serta Bantuan Hukum dan HAM” di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2018, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis sasaran dengan program Penataan Peraturan Perundang-Undangan.

Permasalahan:

1. Banyaknya produk hukum nasional yang belum ditindaklanjuti dengan peraturan daerah, begitu pula sebaliknya banyak peraturan daerah yang perlu ditinjau ulang.
2. Supremasi hukum belum sepenuhnya dapat diimplementasikan sebagai penyelesaian persoalan sosial kemasyarakatan yang muncul.
3. Pembangunan berbasis isu, sepenuhnya belum dianalisis secara tata naskah akademis baik menyangkut aspek: yuridis, sosial dan filosofinya.

Solusi:

1. Pemerintah wajib hadir memberi perlindungan HAM terhadap warga negara yang mengalami ancaman.
2. Pemerintah wajib memenuhi hak-hak politik, memberi peluang berkembangnya aspek kebebasan sipil, memeperkuat aspek kelembagaan demokrasi agar Kabupaten Peduli HAM dapat diwujudkan.
3. Memperkuat Sekretariat Komisi HAM Kabupaten.

18. Sasaran Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan;

Untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya koordinasi pelaksanaan pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Klaten diukur dengan indikator persentase kesesuaian capaian pelaksanaan pembangunan (fisik dan keuangan) dengan target (rencana). Adapun capaian sasaran Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana Tabel 3.46.

Tabel 3.46.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Persentase kesesuaian capaian pelaksanaan pembangunan (fisik dan keuangan) dengan target (rencana)	80	90	87,78	97,53	90	97,53

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam meningkatkan kinerja pembangunan dilakukan dengan melakukan Rapat Koordinasi “*Senenan*” secara rutin, hal ini sebagai bentuk agenda aksi untuk pengendalian kegiatan yang diharapkan menjaga konsistensi capaian pelaksanaan pembangunan dengan target rencana. Pada tahun 2018 tercatat sebanyak 173 program dengan 987 kegiatan. Realisasi fisik tercapai 87,78% dari target rencana. Dukungan dana untuk melaksanakan pembangunan dianggarkan sebanyak Rp.1.018.676.084.121,98 dan terserap sebesar Rp.859.618.219.315,88 (atau 84,39%).

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan. Pada tahun 2018, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan, dengan program Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan.

Permasalahan:

1. Ada beberapa kegiatan fisik yang tidak bisa diselesaikan tepat waktu, karena terbatasnya masa kontrak pekerjaan tidak mencukupi waktunya untuk menyelesaikan pekerjaan. Misalnya Pembangunan Gedung Pemda II, dan gedung kompleks DPRD.

Solusi:

1. Mengefektifkan Pengendalian kegiatan agar semua pekerjaan fisik dapat diselesaikan tepat waktu.

18. Sasaran Terwujudnya Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa yang Kredibel;

Untuk mewujudkan sasaran Terwujudnya pelayanan pengadaan barang dan jasa yang kredibel sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Klaten diukur dengan indikator Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang sesuai regulasi. Adapun capaian sasaran Terwujudnya pelayanan pengadaan barang dan jasa yang kredibel sebagaimana Tabel 3.47

Tabel 3.47.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Terwujudnya Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Yang Kredibel

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang sesuai regulasi)	0	100	100	100	100	100

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam meningkatkan kinerja pembangunan Terwujudnya Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa yang Kredibel dilakukan secara transparan, dan terbuka untuk publik. Pada tahun 2018 tercatat sebanyak 273 usulan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, dari sebanyak 273 usulan yang lolos seleksi secara elektronik sebanyak 252, gagal lelang sebanyak 9, 1 jasa pengadaan barang dan jasa dikembalikan ke OPD, dan 11 penunjukan langsung oleh OPD terkait.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Terwujudnya Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Yang Kredibel dilakukan secara transparan, dengan dukungan program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (Pelayanan Pemilihan penyedia barang dan jasa).

Permasalahan:

Karena semua sistem sudah dijalankan secara *online*, tertutup kemungkinan adanya praktek penyimpangan.

Solusi:

Mengefektifkan Pengendalian kegiatan agar semua pekerjaan fisik dapat diselesaikan tepat waktu.

20. Sasaran Meningkatnya fasilitasi koordinasi bidang kehumasan dan keprotokolan;

Untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya fasilitasi koordinasi bidang kehumasan dan keprotokolan sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Klaten diukur dengan indikator kinerja, diantaranya: Persentase publikasi kebijakan dan kegiatan kepala daerah, Persentase dokumentasi kegiatan kepala Daerah, dan Persentase pelayanan keprotokolan kegiatan kepala daerah. Adapun capaian sasaran "**Meningkatnya fasilitasi koordinasi bidang kehumasan dan keprotokolan**" sebagaimana Tabel 3.48.

Tabel 3.48.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Fasilitasi Koordinasi Bidang Kehumasan dan Keprotokolan

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Persentase publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah	90	90	88,14	97,93	90	97,93
2	Persentase dokumentasi kegiatan kepala Daerah	90	90	98,08	108,98	90	108,98
3	Persentase pelayanan keprotokolan kegiatan Kepala Daerah	100	100	95	95,00	100	95,00

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam *Meningkatkan Fasilitasi Koordinasi Bidang Kehumasan dan Keprotokolan*, pada tahun 2018 jumlah publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah yang direncanakan sebanyak 1720, dan terealisasi sebanyak 1516 (atau 88,14%). Jumlah dokumentasi kegiatan Kepala Daerah yang direncanakan sebanyak 2400 dan terealisasi sebanyak 2354 (98,08%). Sedangkan jumlah pelayanan keprotokolan kegiatan Kepala Daerah yang direncanakan sebanyak 240 dan terealisasi sebanyak 228 (atau 95%).

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran *Meningkatnya Fasilitasi Koordinasi Bidang Kehumasan dan Keprotokolan*

untuk mendukung kegiatan Kepala Daerah dilakukan dengan program Kerjasama dengan Mass Media.

Permasalahan:

Liputan kegiatan Kepala Daerah, belum menjadi dokumen cerita historis kePemerintahan baru sebatas berita/informasi.

Solusi:

Menyusun sekapur sirih setiap event Kepala Daerah yang memiliki nilai historis menjadi cerita sukses perjalanan Pemerintah.

21. Sasaran Meningkatnya Fasilitasi dan Pengawasan Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian;

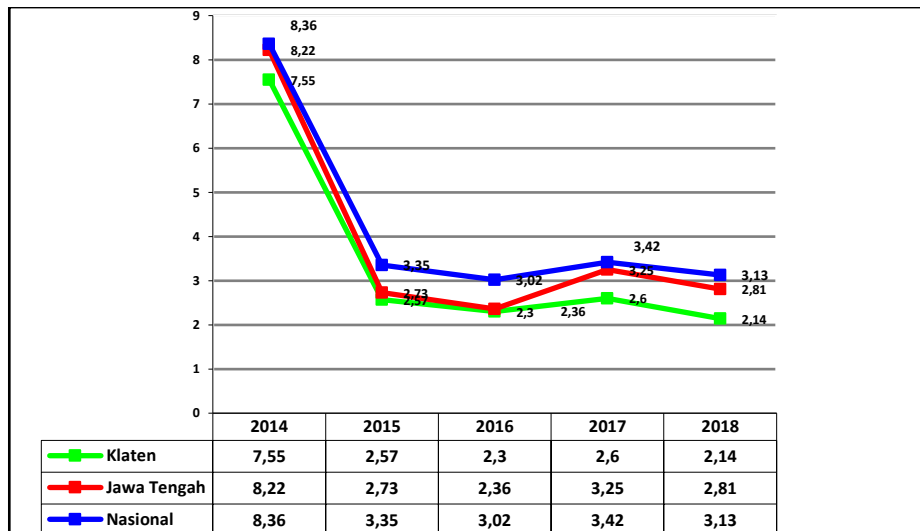
Untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya Fasilitasi dan Pengawasan Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Klaten diukur dengan indikator kinerja Tingkat Inflasi YoY. Adapun capaian sasaran “Meningkatnya Fasilitasi dan Pengawasan Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian” sebagaimana Tabel 3.49

Tabel 3.49.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Fasilitasi dan Pengawasan Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Tingkat Inflasi YoY	4(± 1)	3,5 (± 1)	2,39	68,29	3,5 (± 1)	2,39

Perkembangan inflasi di Kabupaten Klaten selama tahun 2014-2018 sangat fluktuatif. Inflasi di Kabupaten Klaten pada Tahun 2014 sebesar 7,55%, atau lebih tinggi dibanding Tahun 2018 sebesar 2,14%. Penurunan nilai inflasi disebabkan adanya pelaksanaan program pembangunan yang sinergis dan harga komoditas yang stabil. Perkembangan laju inflasi di Kabupaten Klaten selama Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Grafik 3.12.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Klaten, 2019
 Grafik 3.12. Laju Inflasi di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018

Berdasarkan Grafik 3.12 di atas, laju inflasi selama tahun 2014-2018 mengalami perkembangan yang bersifat fluktuatif, namun berdasarkan penggolongannya, inflasi di Kabupaten Klaten apabila dilihat termasuk ringan, karena masih di bawah 10% per tahunnya, dan juga di bawah inflasi nasional maupun provinsi. Sedangkan untuk Tahun 2018 inflasi di Kabupaten Klaten sebesar 2,39% disebabkan oleh terkendalinya harga beberapa komoditas pangan utama dan berfungsinya Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Klaten.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran “Meningkatnya Fasilitas dan Pengawasan Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian” dalam menjaga stabilitas harga dengan menjaga inflasi daerah, agenda aksi ini dilakukan melalui program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.

Permasalahan:

Fluktuatifnya harga kebutuhan pokok, seringkali bergerak lebih cepat dari upaya Pemerintah untuk melakukan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan. Karena kegiatannya Pemerintahan bersifat “linier” tidak “given” atau menunggu waktu.

Solusi:

1. Perlunya stok kebutuhan bahan pokok yang aman dan tersedia; dan
2. Menggerakkan kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Klaten untuk bergerak cepat mengatasi gejolak harga yang dimungkinkan terjadi.

22. Sasaran Meningkatnya Koordinasi Kesejahteraan Rakyat;

Untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya Koordinasi Kesejahteraan Rakyat sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Klaten diukur dengan indikator kinerja Persentase keterlibatan *stakeholder* dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesra. Adapun capaian sasaran “Meningkatnya Koordinasi Kesejahteraan Rakyat” sebagaimana Tabel 3.50.

Tabel 3.50.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Koordinasi Kesejahteraan Rakyat

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Persentase keterlibatan <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesra	90	90	90	100	95	94,74

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam Meningkatkan Koordinasi Kesejahteraan Rakyat, pada tahun 2018 jumlah *stakeholder* yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesra sebanyak 270 dari total 300 stakholder / terealisasi sebanyak 90%. Kegiatan yang dilakukan diantaranya: penyaluran bantuan bagi PMKS, penguatan Pokja Lansia, dan fasilitasi bantuan sosial lainnya.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Meningkatnya Koordinasi Kesejahteraan Rakyat untuk mendukung kegiatan Perangkat Daerah dilakukan dengan program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.

Permasalahan:

Kompleksitas permasalahan sosial belum disusun rencana Aksi Daerah untuk mengatasi isu daerah yang berkembang terkait dengan bidang Kesra.

Solusi:

Perlu disusun Renaksi Daerah Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dengan Perangkat Daerah terkait.

23. Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah;

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak azasi setiap warga negara, hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996. Ketentuan peraturan perundangan ini telah ditindak-lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, ditegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan hal yang sangat penting dalam rangka pembangunan nasional dan membentuk manusia Indonesia yang berkualitas, mandiri dan sejahtera melalui perwujudan persediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Pada kenyataannya peta penduduk rawan pangan yang dilansir BPS masih menunjukkan situasi yang sangat memprihatinkan. Rendahnya aksesibilitas pangan, dengan indikator kemampuan rumah tangga untuk selalu memenuhi kebutuhan pangan anggotanya akan mendorong penurunan konsumsi makanan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman di tingkat rumah tangga. Pada akhirnya akan mengancam dan berdampak pada kekurangan gizi masyarakat, terutama pada kelompok rentan yaitu ibu, bayi dan anak.

Adapun capaian sasaran "Meningkatnya ketersediaan Pangan Beragam, bergizi seimbang dan meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah" sebagaimana Tabel 3.51.

Tabel 3.51.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Meningkatnya
Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB	12,5	12,25	10,98	89,68	12,6	87,14

Luas wilayah Kabupaten Klaten sebesar 655,56 Km². Pada Tahun 2018 berdasarkan pemakaian di lahan pertanian untuk penggunaan lahan sawah 32.959,2 Ha dan untuk lahan bukan sawah sebesar 6.579,5 Ha. Sedangkan untuk lahan bukan pertanian seluas 26.017 Ha. Menurut sistem penggunaan air di Kabupaten Klaten, menunjukkan bahwa sawah dengan

sistem pengairan teknis seluas 19.012 Ha, sistem pengairan setengah teknis seluas 10.314 Ha; sistem pengairan sederhana seluas 2.202 Ha, serta sistem tadah hujan seluas 1.631 Ha.

Penggunaan lahan di Kabupaten Klaten setiap tahunnya selalu berubah dan cenderung mengikuti pertumbuhan jumlah penduduk, dan perluasan kegiatan perekonomian. Perubahan tata guna lahan berhubungan dengan lahan sawah dan lahan kering. Adapun Luas Lahan Pertanian dan Bukan Lahan Pertanian di Kabupaten Klaten tahun 2014–2018 disajikan pada Tabel 3.52.

Tabel 3.52.

Luas Lahan Pertanian dan Bukan Lahan Pertanian
di Kabupaten Klaten Tahun 2014–2018

No.	Kecamatan	Lahan Pertanian Sawah	Lahan Pertanian Bukan Sawah	Lahan Bukan Pertanian	Jumlah	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Prambanan	1,234.7	13.0	1,195	2,443	
2	Gantiwarno	1,624.6	155.0	784	2,564	
3	Wedi	1,552.8	18.0	867	2,438	
4	Bayat	813.4	785.0	2,345	3,943	
5	Cawas	2,313.2	46.0	1,088	3,447	
6	Trucuk	1,905.5	2.0	1,473	3,381	
7	Kalikotes	747.7	8.0	542	1,298	
8	Kebonarum	714.1	2.0	251	967	
9	Jogonalan	1,570.0	1.0	1,099	2,670	
10	Manisrenggo	1,507.4	139.0	1,050	2,696	
11	Karangnongko	764.0	851.0	1,059	2,674	
12	Ngawen	1,032.6	8.0	656	1,697	
13	Ceper	1,517.7	7.0	920	2,445	
14	Pedan	864.7	444.3	608	1,917	
15	Karangdowo	2,045.5	69.0	809	2,923	
16	Juwiring	1,992.0	12.0	975	2,979	
17	Wonosari	2,209.8	14.0	890	3,114	
18	Delanggu	1,288.2	1.0	589	1,878	
19	Polanharjo	1,818.7	92.0	473	2,384	
20	Karanganom	1,676.7	11.0	718	2,406	
21	Tulung	1,734.1	466.5	999	3,200	
22	Jatinom	601.1	1,542.8	1,409	3,553	
23	Kemalang	53.9	1,847.8	3,264	5,166	
24	Klaten Selatan	791.9	3.0	648	1,443	
25	Klaten Tengah	288.4	1.0	603	892	
26	Klaten Utara	296.1	40.0	702	1,038	

No.	Kecamatan	Lahan Pertanian Sawah	Lahan Pertanian Bukan Sawah	Lahan Bukan Pertanian	Jumlah	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Jumlah 2018	32,958,8	6,579.5	26,017	65,556	
	2017	33,021.0	6,581.0	25,954.0	65,556.0	
	2016	33,066.0	6,581.0	25,909.0	65,556.0	
	2015	33,111.0	6,581.0	25,684.0	65,556.0	
	2014	33,166.0	6,581.0	25,809.0	65,556.0	

Sumber: DPKPP Kab. Klaten, 2019

Sedangkan LP2PB (Lahan Perlindungan Pertanian Pangan Berkelanjutan) seluas 32.451 Ha sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), khususnya peruntukan sawah lestari Daerah. Dengan adanya LP2PB tersebut, alih fungsi lahan pertanian dapat dikendalikan dengan rata-rata perubahan lahan pertanian 56 Ha di luar LP2PB. Namun, setiap tahunnya Luas Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Menurut Kecamatan dan Penggunaannya disajikan pada Tabel 3.53.

Tabel 3.53.
Luas Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Menurut Kecamatan dan Penggunaannya di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

Tahun	Dari Sawah & Tegalan (Ha)	Peruntukkan Bangunan Tanah (Ha)				Jumlah (Ha)
		Perumahan	Industri	Perusahaan	Jasa	
2017	45,7611	40,2981	4,515	-	0,948	45,7611
2016	45,392	33,058	8,910	0,113	3,311	45,392
2015	55,230	40,899	13,663	-	0,668	55,230
2014	54,140	40,480	13,660	-	-	54,140
2013	79,7688	44,893	31,160	-	3,7158	79,7688

Sumber: DPKPP Kab. Klaten, 2019

Untuk mengatasi perubahan lahan, dan mengganti produksi pertanian yang hilang akibat perubahan lahan pertanian dikembangkan pola pertanian terpadu, yang merupakan integrasi antara bidang tanaman pangan, bidang peternakan, dan bidang perikanan yang diharapkan kedepan bisa menjadi Kawasan Agropolitan. Perkembangan luas tanam dan luas panen tanaman pangan tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 3.54.

Tabel 3.54.
Perkembangan Luas Tanam dan Luas Panen Tanaman Pangan
Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018

No	Jenis Komoditas	2014		2015		2016		2017		2018	
		Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)
1	Padi	65.678	65.671	69.158	68.661	76.029	73.627	74.964	73.962	70.421	73.810
2	Jagung	15.256	11.427	11.784	11.484	9.682	9.549	11.713	11.085	10510.6	10292.2
3	Kedelai	2.245	2.244	2.820	2.816	1.935	1.523	2.562	2.234	3744.8	3554.7
4	Kacang Tanah	2.102	1.919	2.074	2.073	1.224	1.067	955	909	1346.3	1296.3
5	Kacang Hijau	180	175	116	115	350	299	240	228	18.4	4
6	Ubi Kayu	801	704	707	707	822	685	435	395	304.9	357.9
7	Ubi Jalar	124	108	32	28	24	20	26	21	31	29

Sumber: DPKPP Kab. Klaten, 2019

Tabel 3.55.
Perkembangan Produksi dan Produktivitas
Tanaman Pangan Tahun 2014-2018

No	Jenis Komoditas	2014		2015		2016		2017		2018	
		Produksi (Ton)	Provititas (Kwt/ha)	Produksi (Ton)	Provititas (Kwt/ha)	Produksi (Ton)	Provititas (Kwt/ha)	Produksi (Ton)	Provititas (Kwt/ha)	Produksi (Ton)	Provititas (Kwt/ha)
1	Padi	359.474	56,12	437.623	63,29	426.028	57,87	380.268	51,41	458.992	61.80
2	Jagung	87.422	76,50	94.416	82,22	72.583	74,97	90.343	81,50	81.981	79.65
3	Kedelai	3.485	15,52	5.656	20,06	2.759	18,12	4.440	19,87	7.026	19.77
4	Kacang Tanah	713,24	3,72	3.151	15,20	1.784	14,58	1.527	16,79	1.816	14.01
5	Kacang Hijau	284.608	15,81	134.634	11,61	260	8,72	285	12,50	81	11.31
6	Ubi Kayu	11.992	170,35	20.370	288,12	32.224	392,11	9.778	224,99	9.370	261.80
7	Ubi Jalar	1.215	112,54	369,15	131,84	356	143,55	251	119,28	297	103.67

Sumber: DPKPP Kab. Klaten, 2019

Berdasarkan Tabel 3.54 dan Tabel 3.55 sebagaimana di atas, terlihat bahwa rata-rata luas panen dibawah luas tanam. Hal ini disebabkan karena adanya puso dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), terutama Wereng Batang Coklat (WBC), Tikus, Penggerek Batang dan Sundep. Sehingga hal ini juga berpengaruh terhadap produksi dan produktivitas tanaman pangan terutama padi.

Produksi dan produktivitas padi pada Tahun 2018 meningkat dibandingkan dengan Tahun 2017. Hal ini disebabkan oleh implementasi intensifikasi pertanian yang cukup baik dan penerapan teknologi di bidang pertanian. Sedangkan Produksi Perkebunan tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 3.56.

Tabel 3.56.

Produksi Perkebunan Tahun 2014-2018

No.	Jenis Komoditas	Produksi (Ton)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Tembakau Rajangan	1,201.755	2,191.360	2,193.575	1,233.527	1,744.364
2	Tembakau Asepan	1,167.656	1,164.270	1,038.530	1,070.724	1,514.140
3	Tembakau Vorstenland	164.552	453.740	303.930	239.455	129.115
4	Kelapa Dalam	5,203.615	5,384.477	4,097.630	4,697.582	4,588.666
5	Kelapa Hibrida	45.023	43.556	45.510	45.600	44.133
6	Kelapa Deres	115.917	82.861	99.470	98.740	92.464
7	Kopi Arabica	101.361	101.940	105.250	81.320	81.523
8	Kopi Robusta	4.856	4.856	9.830	9.990	10.150
9	Cengkeh	42.339	46.378	44.220	45.630	47.040
10	Lada	14.256	9.717	13.150	12.110	13.150
11	Tebu	4,352.390	4,184.222	6,289.000	3,258.940	824.760

Sumber: DPKPP Kab. Klaten, 2019

Berdasarkan Tabel 3.56. sebagaimana tersebut di atas, komoditas andalan dan unggulan adalah Tembakau Rajangan produksi tertinggi dicapai pada Tahun 2016 sebesar 2.193,575 Ton dan Tembakau Asepan produksi tertinggi dicapai pada Tahun 2018 sebesar 1,514.140 Ton. Sedangkan populasi ternak pada tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 3.57.

Tabel 3.57.

Populasi Ternak Tahun 2014-2018

No	Jenis Ternak	Populasi Ternak (ekor)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Sapi Potong	98,753	99,438	88,343	88,850	100,259
2	Sapi Perah	5,340	5,486	5,795	6,098	6,284
3	Kambing	86,367	92,014	88,343	88,957	9,596
4	Domba	42,894	43,982	38,489	38,570	45,204
5	Ayam Bukan Ras	1,359,177	1,446,963	2,801,581	3,256,177	2,245,443
6	Ayam Pedaging	1,866,432	1,936,862	2,898,344	3,385,400	2,475,187
6	Ayam Petelur	1,044,474	1,045,869	867,822	930,234	746,422
7	Itik	323,839	292,929	395,436	575,100	425,473
8	Burung Puyuh	448,226	454,596	451,193	452,332	519,566

Sumber: DPKPP Kab. Klaten, 2019.

Berdasarkan Tabel 3.57. sebagaimana tersebut di atas, terlihat pada tahun 2018 populasi sapi potong mengalami kenaikan sebesar 100,259 ekor jika dibandingkan dengan tahun 2017 yaitu sebesar 88.850 ekor. Hal ini dipengaruhi oleh intensifnya penyuluhan tentang kesehatan hewan dan penggunaan bibit ternak yang baik. Sedangkan produksi peternakan tahun 2014–2018 disajikan pada Tabel 3.58.

Tabel 3.58.

Produksi Susu, Daging dan Telur Tahun 2014-2018

No	Jenis	Produksi (Lt/Kg/Butir)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Susu (Liter)	4,200,567	4,030,895	4,878,662	5,903,181	4,266,718
2	Daging (Kg)	2,750,101	2,549,885	2,749,351	2,963,800	584,220
3	Telur (Butir)	278,730,823	246,585,003	375,376,131	570,571,719	130.992.000

Sumber: DPKPP Kab. Klaten, 2019.

Berdasarkan Tabel 3.58. sebagaimana tersebut di atas perkembangan produksi susu, daging dan telur pada Tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan dari Tahun 2014-2017 yang selalu meningkat setiap tahunnya, hal ini dipengaruhi oleh tingginya harga pakan ternak dan menurunnya populasi hewan ternak.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Meningkatkan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Meningkatkan Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah pada tahun 2018 dilaksanakan dengan program, diantaranya:

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan);
2. Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak;
3. Program Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan;
4. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;
5. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
6. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan;
7. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
8. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan; dan
9. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

Permasalahan:

- a. Belum optimalnya penerapan penelitian dan pengembangan di bidang pertanian yang berakibat belum terwujudnya upaya penanganan terpadu di bidang pertanian sebagai pilar penyangga ketahanan pangan.

- b. Belum optimalnya penerapan teknologi, rekayasa genetik, varietas – varietas baru yang memiliki keunggulan absolut dan komparatif, dan belum optimalnya intensifikasi dan diversifikasi hasil – hasil pangan.
- c. Tingginya tingkat penggunaan bahan kimia yang berakibat menurunnya tingkat kesuburan tanah dan kekebalan hama penyakit tanaman sehingga perlu gerakan bersama untuk kembali ke alam (*back to nature*).
- d. Belum optimalnya kepastian hukum dalam rangka memberikan proteksi dan advokasi terhadap petani, demikian pula legalisasi kepemilikan hak kekayaan intelektual (*intellectual property right*) terhadap produk – produk pangan unggulan Kabupaten Klaten.
- e. Belum berkembangnya diversifikasi pangan.
- f. Belum optimalnya pemanfaatan lahan dan pekarangan rumah menuju kawasan rumah pangan lestari.
- g. Belum tercapainya kemandirian dan kedaulatan pangan.
- h. Belum optimalnya sinergitas antara program – program Pemerintah dengan kebutuhan riil dalam mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan, dan belum optimalnya kemampuan dan keterampilan para penyuluh dalam mengoptimalkan kesadaran dan keterampilan petani, dan
- i. Belum terciptanya sinergitas antar Satker dalam melakukan koordinasi terpadu dalam upaya mengoptimalkan urusan ketahanan pangan.

Solusi :

- a. Peningkatan penerapan penelitian dan pengembangan di bidang pertanian untuk mewujudkan penanganan terpadu di bidang pertanian sebagai pilar penyangga ketahanan pangan;
- b. Peningkatan penerapan teknologi, rekayasa genetik, varietas – varietas baru yang memiliki keunggulan absolut dan komparatif, dan peningkatan intensifikasi dan diversifikasi hasil – hasil pangan;
- c. Menekan penggunaan bahan kimia yang berakibat menurunnya tingkat kesuburan tanah dan kekebalan hama penyakit tanaman sehingga perlu gerakan bersama untuk kembali ke alam (*back to nature*);
- d. Penguatan kepastian hukum dalam rangka memberikan proteksi dan advokasi terhadap petani, demikian pula legalisasi kepemilikan hak kekayaan intelektual (*intellectual property right*) terhadap produk – produk pangan unggulan Kabupaten Klaten; dan
- e. Penciptaan sinergitas antara program – program Pemerintah dengan kebutuhan riil dalam mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan, dan belum optimalnya kemampuan dan keterampilan para penyuluh dalam mengoptimalkan kesadaran dan keterampilan petani.

24 Sasaran Meningkatnya Peran LEM, LED dan Pengembangan Potensi TTG di Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan;

Pemerintahan Desa sebagai penyelenggara Pemerintahan terdepan memerlukan peningkatan standar pelayanan dalam hal: pemberdayaan masyarakat, menjaga adat-istiadat, serta melayani kebutuhan administrasi penduduk. Upaya Pemerintah kabupaten dalam Meningkatnya Peran LEM, LED dan Pengembangan Potensi TTG di Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan dengan melakukan berbagai peningkatan partisipasi, dan penyempurnaan regulasi tentang desa. Langkah ini diharapkan akan meningkatkan tata kelola Pemerintahan Desa yang Profesional, Transparan dan Akuntabel. Adapun capaian sasaran "Meningkatnya Peran LEM, LED dan Pengembangan Potensi TTG di Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan" disajikan pada Tabel 3.59.

Tabel 3.59.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Peran LEM, LED dan Pengembangan Potensi TTG di Desa
dalam Penanggulangan Kemiskinan

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Persentase desa yang memiliki LEM, LED dan Posyantek	12	35	35	100	58	60,34

Program pemberdayaan masyarakat untuk mendorong kemandirian desa dan menanggulangi kemiskinan dilaksanakan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Pasar Desa.

Jumlah BUMDes dalam kurun waktu tahun 2013-2014 relatif masih rendah karena belum adanya dukungan dana desa dan komitmen Pemerintah Desa, peningkatan mulai terlihat pada tahun 2015 ketika dana desa mulai diberikan kepada Pemerintah Desa serta ditunjang dengan adanya komitmen dari Pemerintah Desa yang tinggi. Dari 215 BUMDes yang ada di Kabupaten Klaten saat ini, diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) kategori berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan BUMDesa Provinsi Jawa Tengah yaitu: 1. BUMDes Dasar sejumlah 85; 2. BUMDes Tumbuh sejumlah 112; 3. BUMDes Berkembang sejumlah 24; dan 4. BUMDes Maju sejumlah 5.

Guna pengembangan dan optimalisasi pengelolaan BUMDes maka, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melakukan pendampingan kepada

pengelola BUMDes dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Perkembangan lembaga ekonomi Pedesaan tahun 2014–2018 disajikan pada Tabel 3.60.

Tabel 3.60.
Lembaga Ekonomi Perdesaan

Tahun	Jumlah BUMDes	Jumlah Pasar Desa	Pasar Desa Dikelola Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
2014	34	40	5
2015	63	40	5
2016	141	40	5
2017	217	40	5
2018	224	40	5
Jumlah	224	40	5

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2019.

Berdasarkan Tabel 3.60. sebagaimana tersebut di atas, Lembaga ekonomi perdesaan lainnya (Pasar Desa) juga dituntut dapat memberikan kontribusi positif di dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Peran pasar desa belum maksimal karena otoritas manajemen pengelolaan pasar desa belum diberikan sepenuhnya kepada Desa dan masih dikelola oleh Pemerintah Daerah. Hal ini perlu adanya komunikasi dari pihak terkait dalam rangka menyelesaikan permasalahan tersebut, lebih lanjut diharapkan adanya keberpihakan terhadap APBDes dalam rangka pengembangan Pasar Desa.

Pelatihan teknologi tepat guna di perdesaan dari kurun waktu tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 3.61.

Tabel. 3.61.

Pelatihan Teknologi Tepat Guna Tahun 2014-2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jenis Pelatihan TTG yang telah diberikan	1. Pelatihan Pembuatan Aneka Kripik bahan Singkong Pemanfaatan TTG di Desa Kalikotes dengan peserta dari semua desa se Kec. Kalikotes masing desa sebanyak 5 (lima) orang	1. Pelatihan Ternak Lele dengan metode Bioflock Pemanfaatan TTG di Desa Drono peserta dari Desa Drono, Tempursari, Desa Ngawen Kec. Ngawen Desa Wiro Kec. Bayat Desa	1. Pelatihan Pembuatan Aneka Kripik bahan Singkong Pemanfaatan TTG di Desa Bono peserta dari Desa Bono, Pucangmiliran dan Wunut Kec. Tulung	1. Pelatihan Hidroponik Pemanfaatan TTG di Desa Bawukan peserta dari Desa Bawukan dan Desa Panggang Kecamatan Kemalang 2. Pelatihan Ternak Lele dengan metode Bioflock Pemanfaatan TTG di Desa Gunung Gajah	1. Pelatihan pembuatan Briket orang dengan bahan sampah organik di desa Solodiran, Kec Manisrenggo 2. Pelatihan pembuatan Briket orang dengan bahan sampah organik di desa Kranggan, Kec Manisrenggo 3. Pelatihan pembuatan

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
			Ngawonggo Kec. Ceper		peserta dari Desa Kebon dan Desa Gununggajah, Bayat 3 Pelatihan Hidroponik Pemanfaatan TTG di Desa Sidowayah peserta dari Desa Sidowayah dan Desa Kebonharjo Kecamatan Polanharjo	Briket orang dengan bahan sampah organik di desa Taskombang, Kec Manisrenggo 4. Pelatihan pembuatan Briket orang dengan bahan sampah organik di desa Nangsri, Kec Manisrenggo
2.	Data Perkem- bangan Pemanf- aatan Teknolo- gi Tepat Guna (TTG) dipedes- aan	1. Posyantek Kec. Kalikotes	1. Posyantek Kec. Ngawen	1. Posyantek Kec. Kemalang 2. Posyantek Kec. Tulung	1. Posyantek Kec. Karanganom (Keputusan Bupati Klaten No. 414.4/213 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola POSYANTEK Kec. Karanganom Kab. Klaten) 2. Posyantek Kec. Polanharjo (Keputusan Bupati Klaten No. 414.4/214 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola POSYANTEK Kec. Polanharjo Kab. Klaten)	1. Posyantek antar desa TA 2018 di Kec. Cawas, Kec. Wedi

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2019.

Berdasarkan Tabel 3.61. sebagaimana tersebut di atas, mekanisme penerapan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) di Kabupaten Klaten, diawali dengan sosialisasi kepada seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Klaten (26 Kecamatan), kemudian proses pembentukan Teknologi Tepat Guna (TTG) dipilih pada kecamatan yang memiliki potensi untuk dikembangkan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait Meningkatkan Peran LEM, LED dan Pengembangan Potensi TTG di Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan dengan program, diantaranya:

1. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan'; dan
2. Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.

Permasalahan :

1. Masih rendah desa yang memanfaatkan peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG; dan
2. Terbatasnya kualitas sumber daya aparatur desa, untuk memanfaatkan peluang pengembangan teknologi informasi.

Solusi :

1. Percepatan penggunaan Dana Desa yang berorientasi untuk pengembangan LEM, LED dan pengembangan potensi TTG; dan
2. Peningkatan kapasitas SD aparatur desa untuk memanfaatkan era digital bagi pengembangan desa.

**25. Sasaran Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing
Sektor Kepariwisata;**

Sektor pariwisata merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mempunyai keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya sebagai penggerak utama perekonomian di daerah, untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten dengan mendorong sektor pariwisata untuk mengembangkan produktifitas, dan nilai tambah untuk meningkatkan daya saing daerah.

Adapun capaian Sasaran "Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisata" sebagaimana Tabel 3.62.

Tabel 3.62.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor
Kepariwisata

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Persentase Peningkatan PAD dari sektor Pariwisata	5	25	47,50	190	100	36,54

Pengembangan pariwisata Kabupaten Klaten dapat dilihat antara lain dari produk wisata. Produk pariwisata di Kabupaten Klaten mencakup:

A. Jenis Kekayaan Wisata Alam

Kabupaten Klaten mempunyai banyak wisata alam maupun wisata buatan. Nama dan jenis obyek wisata serta lokasinya di Kabupaten Klaten disajikan pada Tabel 3.63.

Tabel 3.63.

Nama dan Jenis Obyek Wisata serta Lokasinya
di Kabupaten Klaten Tahun 2018

No.	Nama Obyek Wisata	Jenis Obyek Wisata	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)
01.	Perayaan Padusan	Event Tradisional	Kec. Tulung Kab.Klaten
02.	Perayaan Maleman	Event Tradisional	Kec. Klaten Utara
03.	Perayaan Syawalan	Event Tradisional	Kec. Bayat dan Kec. Kalikotes
04.	Perayaan Yaqowiyu	Event Tradisional	Kec. Jatinom
05.	Deles Indah	Wisata Alam	Kec. Kemalang
06.	Sumber Air Ingas (OMAC)	Wisata Alam	Kec. Tulung Kab.Klaten
07.	Makam Sunan Pandanaran	Wisata Sejarah dan Religi	Kec. Bayat
08.	Jombor Permai	Wisata Alam	Kec. Bayat
09.	Makam R.Ng Ronggowarsito	Wisata Sejarah dan Religi	Kec. Trucuk
10.	Makam Ki Ageng Perwito	Wisata Sejarah dan Religi	Kec. Wonosari
11.	Pemandian Jolotundo	Wisata Alam	Kec. Karanganom
12.	Candi Plaosan, Sojiwan, Sewu dan Candi Bubrah	Wisata Sejarah dan Religi	Kec. Prambanan
13.	Makam Ki Agen Gribig	Wisata Sejarah dan Religi	Kec. Jatinom
14.	Sendang Sinongko	Wisata Alam	Kec. Ceper
15.	Umbul Pongkok, Nganten, Siblarak dan Umbul Nilo	Wisata Air dan Snarkling	Kec. Polanharjo
16.	Umbul Pelem	Wisata Air	Kec. Tulung
17.	Umbul Susuhan	Wisata Air	Kec. Ngawen
18.	Umbul Brintik, Brondong, Geneng dan Umbul Pluneng	Wisata Air	Kec. Kebonarum
19.	Desa Wisata Bugisan	Wisata Budaya dan Sejarah	Kec. Prambanan
20.	Desa Wisata Nganjat	Wisata Air dan Perikanan Nila	Kec. Polanharjo
21.	Desa Wisata Janti	Pemancingan	Kec. Polanharjo
22.	Desa Wisata Sidowayah	Wisata Air, Outbond, Kampung Dolanan dan Oase	Kec. Polanharjo
23.	Desa Wisata Soropaten	Wisata Budaya	Kec. Karanganom
24.	Desa Wisata Beku	Wisata Air dan Outbond	Kec. Karanganom

No.	Nama Obyek Wisata	Jenis Obyek Wisata	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)
25.	Desa Wisata Kebondalem Kidul	Wisata Budaya, Sejarah dan Industri	Kec. Prambanan
26.	Desa Wisata Soran-Duwet	Wisata Budaya dan Outbond	Kec. Ngawen
27.	Desa Wisata Jarum	Wisata Budaya dan Kerajinan Batik	Kec. Bayat
28.	Desa Wisata Krakitan	Wisata Religi dan Alam	Kec. Bayat
30.	Desa Wisata Paseban	Wisata Religi, Budaya dan Industri	Kec. Bayat
31.	Desa Wisata Gunung Gajah	Wisata Alam	Kec. Bayat
32.	Desa Wisata Jotangan	Wisata Alam	Kec. Bayat
33.	Desa Wisata Demak Ijo	Wisata Budaya dan Kerajinan	Kec. Karangnongko
34.	Desa Wisata Karangnongko	Wisata Budaya dan Sejarah	Kec. Karangnongko
35.	Desa Wisata Balerante	Wisata Alam dan Air	Kec. Kemalang
36.	Desa Wisata Sidorejo	Wisata Alam dan Agro	Kec. Kemalang
37.	Desa Wisata Tegalmulyo	Wisata Alam, Outbond dan Embung	Kec. Kemalang
38.	Desa Wisata Nglinggi	Wisata Pemancingan dan Kuliner	Kec. Klaten Selatan
39.	Desa Wisata Mlese dan Tlising	Industri Lurik	Kec. Cawas
40.	Desa Wisata Melikan	Wisata Budaya dan Kerajinan Keramik	Kec. Wedi
41.	UmbulTirtomulyani&TirtoMulyono	Alam	Kec. Kebonarum
42.	WatuPrahu Bukit Cinta	Alam	Kec. Bayat
43.	WatuSepur	Alam	Kec. Bayat
44.	Bukit Petrum	Alam	Kec. Bayat
45.	Puncak Arjuna	Alam	Kec. Bayat
46.	Kedungan Waterpark	Buatan	Kec. Pedan
47.	Tirtonirmolo	Buatan	Kec. Prambanan
48.	Museum Gula Jawa Tengah	Buatan	Kec. Jogonalan
49.	Candi Merak	Budaya	Kec. Karangnongko
50.	Candi Sojiwan	Budaya	Kec. Prambanan
51.	Kolam Renang Tirta Pelangi	Buatan	Kec. Bayat
52.	Kolam Renang Tirta Indah	Buatan	Kec. Klaten Selatan
53.	Kolam Renang Tirta Harapan	Buatan	Kec. Klaten Utara
54.	Desa Wisata Glagah	Edukasi	Kec. Jatinom
55.	Wisata Hidroponik	Edukasi	Kec. Kemalang
56.	Kalitalang	Alam	Kec. Kalitalang
57.	Banyu Beku	Alam	Kec. Polanharjo
58.	Water Gong	Alam	Kec. Polanharjo
59.	Ponggok Ciblon	Buatan	Kec. Polanharjo
60.	Susur Kali Pusur	Alam	Kec. Tulung
61.	Tugu Waseso Soropaten	Budaya	Kec. Polanharjo
62.	Taman Celosia Tlogo Nursery	Buatan	Kec. Prambanan
63.	Umbul Gedaren	Alam	Kec. Jatinom
64.	Umbul Manten	Alam	Kec. Tulung
65.	Umbul Brondong	Alam	Kec. Kebonarum
66.	Omah Wayang	Budaya	Kec. Klaten Selatan

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Klaten , 2019

B. Jenis Kekayaan Wisata Budaya

Jenis kekayaan wisata budaya di Kabupaten Klaten antara lain: Candi Plaosan, Candi Lumbung, Candi Bubrah, Candi Asu (Sona), Candi Sojiwan, Candi Merak, Candi Karangnongko, Candi Sewu, Masjid Jimbung, Masjid Golo, Masjid Jawi, Makam Syech Domba, Makam Syeh Kewel, Makam Ki Ageng Gribig, Makam R Ng. Ronggowarsito, Situs Kaliworo, dan Situs Wonobojo, Makam Sunan Pandanaran, dan Makam Kyai Mlati.

C. Tempat Bersejarah

Tempat bersejarah yang ada di Kabupaten Klaten diantaranya: Monumen Juang 45 Klaten, Monumen PARATA MBKD Pos X-I, Museum Gula Jawa Tengah di Jogonalan, Monumen Patung Kemerdekaan Soekarno, Goa Jepang dan Pesanggrahan Pakubuwono di Deles.

Jumlah Obyek Wisata Dan Pengunjung

Perkembangan jumlah obyek wisata dan pengunjung di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu Tahun 2014-2018 menunjukkan peningkatan, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.64.

Tabel 3.64.

Jumlah Obyek Wisata, Pengunjung, Lama Tinggal dan Rata-rata Pengeluaran Wisatawan Nusantara (Wisnus) dan Wisatawan Mancanegara (Wisman) Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah Obyek Wisata (obyek)	Pengunjung (orang)		Lama Tinggal (hari)		Rata-rata Pengeluaran (Rp.000)	
		Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman
2014	82	320.687	185	1	0,5	475	750
2015	82	329.021	220	1	0,5	550	1.000
2016	82	377.409	372	1	1	750	1.500
2017	82	2.224.294	190.686	1	1	1.000	2.000
2018	82	2.483.945	222.373	1	1	1.000	2.000

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Klaten, 2019

Berdasarkan Tabel 3.64 sebagaimana tersebut di atas, dapat dilihat bahwa jumlah pengunjung obyek wisata pada tahun 2014 -2018 mengalami kenaikan dan didominasi oleh wisatawan nusantara, sedangkan wisatawan mancanegara relatif lebih sedikit karena wisatawan mancanegara lebih banyak berkunjung ke Candi Prambanan. Hal ini disebabkan adanya penataan di beberapa obyek wisata dan naiknya jumlah pengunjung pada beberapa perayaan seperti Maleman, Syawalan dan Yaqowiyu.

Sedangkan di sisi lain lama tinggal wisatawan Nusantara rata-rata hanya satu hari dan untuk wisatawan mancanegara rata-rata hanya 0,75 hari. Hal ini disebabkan kebanyakan para wisatawan, baik nusantara maupun mancanegara hanya sekedar berkunjung di tempat obyek wisata saja dan lebih menyukai menginap di Yogyakarta ataupun Surakarta. Demikian juga dengan rata-rata pengeluaran relative belum begitu besar, untuk wisatawan nusantara hanya berkisar antara Rp. 350.000,- sampai Rp.1.000.000,- dan wisatawan mancanegara berkisar Rp.500.000,- sampai Rp.2.000.000,- Sumbangan Sektor Pariwisata Terhadap PAD tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 3.65.

Tabel 3.65.

Sumbangan Sektor Pariwisata Terhadap PAD
Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018

No	Jenis Obyek Wisata Perayaan	Target (Rp. 000)					Realisasi (Rp)				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Perayaan Padusan	57.500	57.500	52.500	52.500	57.500	57.500	57.500	52.500	57.500	58.000
2	Perayaan Maleman	26.000	26.000	28.000	28.000	28.000	26.100	26.000	28.000	28.000	28.000
3	Perayaan Syawalan	47.000	47.000	51.700	51.700	53.000	47.000	47.000	51.700	52.500	53.000
4	Perayaan Yagowiyu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Deles Indah	12.500	12.500	14.000	14.000	25.000	12.500	12.500	14.000	15.600	9.600
6	OMAC	555.045	555.045	600.000	600.000	1.680.500	481.149	559.175	609.976	739.919	943.170
7	Jombor Permai	62.500	62.500	65.000	65.000	68.000	72.915	68.205	65.495	68.050	71.450
8	Makam Pandanaran	100.000	100.000	134.000	114.000	180.000	162.900	152.300	143.300	144.500	141.200
9	Makam Ronggowarsito	1.605	1.605	1.800	1.800	2.000	1.740	1.880	1.890	2.000	2.050
10	Pemandian Jolotundo	22.000	22.000	24.200	24.200	77.000	22.000	22.017,5	24.200	50.170	81.680
11	Candi Plaosan	2.500	2.500	5.000	50.000	100.000	7.101	7.758	53.883	80.454	218.718
12	Makam Ki Ageng Gribig	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	2.000	2.000	3.000	3.030	3.041
13	Lain-lain	21.350	21.350	21.350	21.350	21.350	20.717	21.350	23.850	13.450	12.460
	Jumlah	910.000	910.000	1.000.550	1.025.550	2.295.350	913.622	977.685,5	1.071.794	1.255.173	1.622.369

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Klaten , 2019

Berdasarkan Tabel 3.65. sebagaimana tersebut di atas, terlihat bahwa kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD belum optimal. Pada Tahun 2014-2017 realisasi pendapatan mencapai di atas target, tetapi belum signifikan sedangkan pada Tahun 2018 realisasi pendapatan tidak memenuhi target, sehingga pendapatan dari sektor pariwisata tersebut masih perlu dioptimalkan.

Permasalahan :

Permasalahan yang dijumpai dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Klaten adalah masih perlunya peningkatan pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata serta peningkatan sumber daya manusia yang terkait dengan kepariwisataan serta penataan kawasan pariwisata yang dapat memiliki daya tarik.

Solusi :

Peningkatan pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata serta peningkatan sumber daya manusia yang terkait dengan kepariwisataan serta penataan kawasan pariwisata yang dapat memiliki daya tarik.

26. Sasaran Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM;

Sektor perdagangan, koperasi dan UKM merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mempunyai keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya sebagai penggerak utama perekonomian di daerah, untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan. Upaya yang dilakukan untuk Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM diupayakan dengan berbagai kebijakan Daerah yang mendukung urusan perdagangan, koperasi dan UKM.

Adapun capaian Sasaran Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM sebagaimana Tabel 3.66.

Tabel 3.66.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing pada Urusan
Perdagangan, Koperasi dan UKM

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	18,74	18,94	17,88	94,40	19,38	92,26
2	Persentase UMKM yang memiliki daya saing	5	9	8,99	99,88	15	59,93

1. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

Pada tahun 2018 tercatat kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tumbuh sebesar 17,88%. Tumbuhnya sektor perdagangan ini ditunjang adanya pengembangan dan pemberdayaan UKM melalui pola kluster dan penetapan Produk Unggulan Daerah diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta dapat menjadi daya ungkit bagi pertumbuhan sektor dan sub sektor lainnya.

2. Persentase UMKM yang Memiliki Daya Saing

Pada tahun 2017 jumlah UMKM sebanyak 54.966 dan jumlah UMKM yang berdaya saing sebanyak 3.727 atau sebesar 6,9%. Pada tahun 2018 tercatat sebanyak 55.016 UMKM dan yang berdaya saing sebanyak 4.946 atau sebanyak 8,99%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2017, capaian tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 2,09%.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Meningkatkan Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2018, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis sasaran Meningkatkan Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM diantaranya dengan program:

1. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan;
2. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri;
3. Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan;
4. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah;
5. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM; dan
6. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;

Permasalahan :

- a. Terbatasnya akses dan perluasan pasar produk ekspor serta kurang berkembangnya kerjasama perdagangan internasional;
- b. Lemahnya daya saing dan belum optimalnya pengembangan mutu, desain dan merk dagang beberapa produk ekspor;
- c. Terbatasnya kemampuan SDM pelaku usaha di sektor perdagangan khususnya Usaha Dagang Kecil Menengah;
- d. Masih lemahnya legalisasi hak kekayaan intelektual terhadap produk – produk perdagangan unggulan Kabupaten Klaten;
- e. Belum optimalnya penataan dan pemberdayaan PKL;

- f. Masih kurangnya ketersediaan sarana prasarana pasar yang representatif;
- g. Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk memberikan informasi, data dan laporan perkembangan usahanya;
- h. Kurangnya inovasi dan diversifikasi produk; dan
- i. Terbatasnya produk berorientasi ekspor.

Solusi :

- a. Peningkatan akses dan perluasan pasar produk ekspor dengan membuka kerjasama perdagangan internasional;
- b. Penguatan daya saing dengan pengembangan mutu, desain dan merk dagang beberapa produk ekspor;
- c. Optimalisasi pelaksanaan perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar;
- d. Peningkatan kemampuan kualitas SDM pelaku usaha di sektor perdagangan khususnya Usaha Dagang Kecil Menengah.
- e. Mengupayakan legalisasi hak kekayaan intelektual terhadap produk – produk perdagangan unggulan Kabupaten Klaten; dan
- f. Penataan dan pemberdayaan PKL.

27. Sasaran Meningkatnya Penerapan Inovasi Dalam Pembangunan Daerah;

Penerapan inovasi dalam pembangunan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mempunyai keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya sebagai penggerak utama perekonomian di daerah, untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pelayanan masyarakat.

Adapun capaian Sasaran “Meningkatnya Penerapan Inovasi Dalam Pembangunan Daerah” sebagaimana Tabel 3.67.

Tabel 3.67.


Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Penerapan Inovasi Dalam Pembangunan Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Persentase inovasi yang diterapkan	31,82	72,73	60	82,56	100	60

Inovasi Pembangunan Daerah merupakan upaya untuk mengakselerasi pencapaian-pencapaian pembangunan daerah dan pengembangan Daerah. Inovasi ini didorong munculnya pola pikir yang inovatif menjadi pijakan bagi kerangka penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Gambaran inovasi-inovasi yang telah dilakukan dan terus dikembangkan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten disajikan pada Tabel. 3.68.

Tabel 3.68.

Inovasi Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten

No	Inovasi	Gambaran Ringkas	Urusan Bidang Terkait
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Matur Dokter	<p>Matur Dokter merupakan aplikasi yang berfungsi untuk mempermudah masyarakat di Kabupaten Klaten dalam mendapat informasi atau melakukan pengaduan dan konsultasi tentang masalah kesehatan kepada petugas. Dalam Aplikasi Matur Dokter memiliki beberapa fitur seperti logo, Panel Kontrol, <i>Whatsapp Chat</i> Darurat, Telepon Darurat, Informasi Tempat Tidur Rumah Sakit, Matur Dokter, Forum Kesehatan, Berita Kesehatan, Tips Kesehatan, <i>Slide Show</i> Berita Kesehatan</p> 	Kesehatan

2	<p>e-Planning e-Budgeting</p>	<p>Perencanaan APBD dimulai dari perencanaan RKPD/Renja Perangkat Daerah yang sudah dilakukan melalui aplikasi yang berbasis web yang dapat diakses melalui alamat http://e-planning.klatenkab.go.id.</p> <p>Fokus aplikasi ini dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan tahunan/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang dalam tahapan penyusunannya mengakomodir dan mendokumentasikan antara lain Musrenbang Kecamatan, E-Reses yang menghasilkan Pokok-Pokok Pikiran DPRD, serta penyusunan rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang selanjutnya dibahas dalam Forum Perangkat Daerah</p>  <p>Sistem aplikasi integrasi perencanaan dan penganggaran sudah dibangun di tahun 2018, dengan berbasis web yang dapat diakses di alamat http://ebudgeting.klatenkab.go.id/</p> <p>Sistem ini digunakan dalam penyusunan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang mempedomani dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sampai dengan rincian belanja yang disusun menjadi PRA-RKA yang kemudian dijadikan dasar penyusunan Raperda APBD yang diintegrasikan dalam sistem SIMDA.</p> 	Perencanaan
---	-----------------------------------	---	-------------

No	Inovasi	Gambaran Ringkas	Urusan Bidang Terkait
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Pengembangan Varietas Padi Rojo Lele	Latar belakang pengembangan varietas padi Rojolele adalah keinginan untuk pelestarian varietas tersebut, dikarenakan petani mulai enggan menanam disebabkan oleh kondisi fisik varietas padi yang tinggi sekitar 180 cm, sehingga mudah rebah pada saat akan panen dan umur tanaman yang lama sekitar lima setengah bulan. Bekerjasama dengan instansi BATAN (Badan Tenaga Nuklir Nasional) kelemahan tersebut diperbaiki dengan tujuan memendekkan umur tanaman dan memendekkan tinggi tanaman. Penelitian dimulai bulan Desember 2013 dan saat ini tujuan tersebut telah tercapai, umur tanaman lebih pendek menjadi sekitar seratus hari dan tinggi tanaman menjadi sekitar 110 cm. disamping itu tambahan hasil positifnya antara lain produktivitas menjadi lebih besar diindikasikan dari jumlah anakan yang lebih banyak, serta sifat padi rojolele yang pulen dan wangi masih terjaga. Direncanakan pada awal pebruari dijadwalkan akan dilakukan uji proposal pelepasan varietas padi hasil penelitian sebagai varietas padi Rojolele yang baru sebagai varietas lokal khas Klaten.	Penelitian dan Pengembangan
4	Layanan e-KTP Mobile	Layanan e-KTP mobile dilakukan dalam rangka pendekatan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil. e-KTP mobile diutamakan menyasar pada siswa-siswa sekolah yang telah wajib KTP, penduduk usia wajib KTP yang mempunyai keterbatasan fisik dan masyarakat umum.	

28. Sasaran Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing Sektor Penanaman Modal;

Sektor penanaman modal merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mempunyai keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya sebagai penggerak utama perekonomian di daerah untuk mendorong peningkatan daya saing daerah. Upaya yang dilakukan untuk Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing Sektor Penanaman Modal diupayakan dengan berbagai kebijakan Daerah yang mendukung urusan penanaman modal.

Adapun capaian Sasaran *Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing Sektor Penanaman Modal* sebagaimana Tabel 3.69.

Tabel 3.69.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing Sektor Penanaman
Modal

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Rasio daya serap tenaga kerja (PMDN/PMA):						
	PMDN	189	417	131	31,41	483	27,12
	PMA	46	294	264	89,79	294	89,80
2	Persentase pertumbuhan realisasi investasi (PMDN/PMA):						
	PMDN	1,75	1,98	1078	54.444,44	2,50	43.120
	PMA	2,25	2,45	52	2122,45	2,55	2.039,22

Kondisi perekonomian Kabupaten Klaten diukur dari berbagai variabel makro seperti PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi, tingginya kedua variable tersebut sangat mendukung masuknya investasi baik dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Gambaran jumlah Investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018, disajikan pada Tabel 3.70.

Tabel 3.70.

Jumlah Investasi PMA dan PMDN
Tahun 2014-2018

Tahun	Penanaman Modal Asing				Penanaman Modal Dalam Negeri		
	Nilai Investasi (US\$)	Nilai Investasi (Rp.000)	Jumlah Proyek	Kenaikan / Penurunan (%)	Nilai Investasi (Rp 000.)	Jumlah Proyek	Kenaikan/ Penurunan (%)
2014	12.246.600	149.922.877,2	6	-77	25.000.000	1	-85
2015	7.080.000	88.500.000	5	83	401.071.500	21	1.504
2016	11.278.800	154.102.700	5	-42	89.208.500	12	-78
2017	17.179.600	231.535.000	4	59	334.295.500	7	275
2018	90.087.482	1.261.224.753,17	20	52	3.939.171.301,52	133	1.078

Sumber Data : DPMPSTSP Kabupaten Klaten, 2019

Berdasarkan Tabel 3.70. sebagaimana tersebut di atas, dapat dilihat bahwa jumlah investasi PMDN maupun PMA pada Tahun 2018 mengalami peningkatan yaitu PMDN sebesar Rp.3.939.171.301.520,- dan PMA sebesar 1.261.224.753.170 US\$ dibandingkan dengan Tahun 2017 yaitu PMDN sebesar Rp.334.295.500.000,- dan PMA sebesar Rp. 231.535.000.000. Hal ini disebabkan

oleh iklim usaha yang kondusif, fasilitas dan infrastruktur investasi yang memadai, ketersediaan tenaga kerja.

1. Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN)

Faktor penting lain yang juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah adalah penanaman modal/investasi. Penanaman modal/investasi tidak bisa dilepaskan dari sektor usaha industri, semakin besar dan berkembang industri di suatu daerah semakin besar investasi yang ditanamkan dalam daerah tersebut. Perkembangan PMDN di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel 3.71.

Tabel 3.71.

Perkembangan Realisasi PMDN Tahun 2014-2018

No	Uraian	Satuan	PMDN				
			2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah Usaha	Unit	1	21	12	7	133
2	Jumlah Tenaga Kerja	Orang	100	3.959	2.861	2.781	17.413
3	Nilai Investasi (Rp. 000)	Rp.	25.000.000	401.071.500	89.208.500	334.295.500	3.939.171.301,52

Sumber Data : DPMPSTSP Kabupaten Klaten, 2019

2. Penanaman Modal Asing (PMA)

Jumlah investasi PMA di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu Tahun 2014-2018 mengalami peningkatan. Perkembangan PMA di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel 3.72.

Tabel 3.72.

Perkembangan Realisasi PMA Tahun 2014-2018

No	Uraian	Satuan	PMA				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Usaha	Unit	6	5	5	4	20
2	Jumlah Tenaga Kerja	Orang	521	230	1.468	79	5.270
3	Nilai Investasi	(US \$)	12.246.600	7.080.000	11.278.800	17.179.600	90.087.482

Sumber Data : DPMPSTSP Kabupaten Klaten, 2019

Berdasarkan Tabel 3.71 dan Tabel 3.72 sebagaimana tersebut di atas, realisasi perkembangan PMDN dan PMA di Kabupaten Klaten tahun 2018 terlihat bahwa sebagian perusahaan atau proyek belum dapat merealisasikan investasi atau penanaman modal, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Penanaman Modal didukung dengan program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.

Permasalahan :

1. Kurangnya informasi terkait potensi investasi; dan
2. Harga tanah peruntukan industri yang tinggi.

Solusi :

- a. Peningkatan akses dan perluasan pasar produk ekspor dengan membuka kerjasama perdagangan internasional;
- b. mengupayakan pemanfaatan lahan kritis sebagai lokasi investasi, dan Pemerintah daerah wajib menyediakan infrastruktur penunjang.

29. Sasaran Meningkatnya dan Pengembangan Produktifitas, Nilai Tambah dan Data Saing Sektor Ketenagakerjaan;

Masalah angkatan kerja adalah masalah yang perlu mendapat perhatian serius dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah. Karakteristik angkatan kerja ini sangat besar pengaruhnya bagi kesejahteraan penduduk, terutama jika dilihat secara ekonomi makro. Proporsi atau jumlah pengangguran terbuka dari angkatan kerja berguna sebagai acuan Pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Di samping itu, trend indikator ini akan menunjukkan keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun.

Adapun capaian sasaran “ Meningkatnya dan Pengembangan Produktifitas, Nilai Tambah dan Data Saing Sektor Ketenagakerjaan” disajikan pada Tabel 3.73.

Tabel 3.73.
**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
 Meningkatnya dan Pengembangan Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya
 Saing Sektor Ketenagakerjaan**

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Rasio penduduk yang bekerja	0,97	1,03	0,87	84,47	1,08	80,55
2	Angka partisipasi angkatan kerja	67,79	69	73,58	106,64	69	106,64

1. Rasio Penduduk yang bekerja

Pada Tahun 2018 jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 586.684 jiwa, sedangkan jumlah angkatan kerja sebanyak 674.273. Sehingga rasio penduduk yang bekerja sebesar 0,87%.

2. Tingkat partisipasi angkatan kerja

Pada tahun 2018 jumlah angkatan kerja usia 15 tahun ke atas sebanyak 674.273 jiwa, sedangkan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas sebanyak 916.377 jiwa. Sehingga tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 73,58%.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari sasaran Meningkatnya dan Pengembangan Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Ketenagakerjaan di Kabupaten Klaten dengan dukungan program:1) Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, dan 2) Peningkatan Kesempatan kerja.

Permasalahan:

- a. Terbatasnya kesempatan kerja yang disebabkan oleh: (i) ketidakseimbangan antara kesempatan kerja yang ada dengan kebutuhan masyarakat akan pekerjaan; dan (ii) Penyerapan angkatan kerja yang ada tidak sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja, sehingga jumlah pengangguran bertambah;
- b. Peluang kerja relatif belum bisa menampung tenaga kerja bagi pencari pekerjaan;
- c. Hambatan budaya (feodalisme), masyarakat cenderung kepada pekerjaan kantoran (pegawai negeri, dll) sebagai pekerjaan prestisius, sehingga mematikan kreatifitas untuk bekerja di luar sektor jasa Pemerintahan;
- d. Rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang disebabkan oleh: (i) Rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja; (ii) Rendahnya ketrampilan tenaga kerja; (iii) Ketidaksesuaian antara persyaratan kualifikasi yang dibutuhkan oleh pasar kerja dengan kompetensi pendidikan yang dimiliki; (iv) Ketersediaan lembaga pelatihan untuk meningkatkan kualitas pekerja juga belum memadai;
- e. Meningkatnya jumlah pencari kerja yang diakibatkan angkatan kerja baru, tidak sebanding dengan lapangan kerja yang tersedia;

- f. Belum optimalnya pembinaan dan pemihakan anggaran terhadap kelompok – kelompok pengangguran untuk membuka kesempatan kerja mandiri melalui pemberdayaan usaha ekonomi produktif ;
- g. Belum optimalnya pelatihan kerja bagi para angkatan kerja guna meningkatkan keterampilan untuk mampu bersaing di pasar kerja;
- h. Belum optimalnya organisasi serikat pekerja sebagai wadah perjuangan hak – hak pekerja;
- i. Belum optimalnya proteksi dan advokasi terhadap tenaga kerja yang berakibat kurangnya nilai tawar tenaga kerja;
- j. Inkonsistensi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI); dan
- k. Belum tersedianya *database* ketenagakerjaan.

Solusi :

- a. Membuka peluang kerja seluas-luasnya untuk menampung tenaga kerja bagi pencari pekerjaan;
- b. Menghilangkan hambatan budaya (feodalisme), bahwa semua lapangan kerja adalah pekerjaan prestisius, sehingga akan membuka ruang kreatifitas untuk bekerja di luar sektor jasa Pemerintahan;
- c. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang disebabkan oleh: (i) Rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja; (ii) Rendahnya ketrampilan tenaga kerja; (iii) Ketidaksesuaian antara persyaratan kualifikasi yang dibutuhkan oleh pasar kerja dengan kompetensi pendidikan yang dimiliki; (iv) Ketersediaan lembaga pelatihan untuk meningkatkan kualitas pekerja juga belum memadai;
- d. Mengoptimalkan pembinaan dan pemihakan anggaran terhadap kelompok – kelompok pengangguran untuk membuka kesempatan kerja mandiri melalui pemberdayaan usaha ekonomi produktif ;
- e. Mengoptimalkan pelatihan kerja bagi para angkatan kerja guna meningkatkan keterampilan untuk mampu bersaing di pasar kerja.
- f. Mengoptimalkan organisasi serikat pekerja sebagai wadah perjuangan hak – hak pekerja;
- g. Mengoptimalkan proteksi dan advokasi terhadap tenaga kerja yang berakibat kurangnya nilai tawar tenaga kerja; dan
- h. Merintis *database* ketenagakerjaan secara *online*.

30. Sasaran Meningkatnya Perlindungan Sektor Ketenagakerjaan;

Perlindungan tenaga kerja sangat besar pengaruhnya bagi kesejahteraan penduduk, terutama jika dilihat secara ekonomi makro. Tidak saja memberi rasa nyaman bagi pekerja, tetapi juga menjaga ketahanan daerah. Sehingga perlunya perlindungan tenaga kerja akan menunjukkan keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun.

Adapun capaian sasaran "Meningkatnya Perlindungan Sektor Ketenagakerjaan" disajikan pada Tabel 3.74.

Tabel 3.74

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Perlindungan Sektor Ketenagakerjaan

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	86,81	87,60	82,59	94,28	25,5	323,88

1. Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan

Jumlah tenaga kerja di sektor PMA pada tahun 2017 sebanyak 79 jiwa dan yang bekerja di sektor PMDN sebanyak 2.781 jiwa. Pada tahun 2018 jumlah tenaga kerja di sektor PMA sebanyak 5.270 jiwa, dan di sektor PMDN sebanyak 9.413 jiwa. Jumlah pekerja/buruh pada tahun 2018 sebanyak 14.683 jiwa (di sektor PMA/PMDN) yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan mencapai 12.127 jiwa (atau 82,59%). Sehingga masalah perlindungan tenaga kerja adalah masalah yang perlu mendapat perhatian besar dalam melakukan perencanaan pembangunan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari sasaran Meningkatnya Perlindungan Ketenagakerjaan di Kabupaten Klaten dengan dukungan program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

Permasalahan:

1. Belum optimalnya organisasi serikat pekerja sebagai wadah perjuangan hak – hak pekerja;
2. Belum optimalnya proteksi dan advokasi terhadap tenaga kerja yang berakibat kurangnya nilai tawar tenaga kerja;

3. Belum optimalnya pembinaan dan pemihakan anggaran terhadap kelompok – kelompok pekerja/buruh melalui pemberdayaan usaha ekonomi produktif ;
4. Belum optimalnya pelatihan kerja bagi para angkatan kerja guna meningkatkan keterampilan untuk mampu bersaing di pasar kerja;

Solusi :

- a. Menghilangkan hambatan budaya (feodalisme), bahwa semua lapangan kerja adalah pekerjaan prestisius, sehingga akan membuka ruang kreatifitas untuk bekerja di luar sektor jasa Pemerintahan dan wajib difasilitasi menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan;
- b. Mengoptimalkan pembinaan dan pemihakan anggaran terhadap kelompok – kelompok pekerja/buruh melalui pemberdayaan usaha ekonomi produktif;
- c. Mengoptimalkan organisasi serikat pekerja sebagai wadah perjuangan hak – hak pekerja; dan
- d. Mengoptimalkan proteksi dan advokasi terhadap tenaga kerja yang berakibat kurangnya nilai tawar tenaga kerja.

31. Sasaran Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing Sektor Perindustrian;

Sektor perindustrian merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mempunyai keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya sebagai penggerak utama perekonomian di daerah, untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan, serta menumbuhkan daya saing daerah. Upaya yang dilakukan untuk Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing Sektor Industri diupayakan dengan berbagai kebijakan Daerah yang mendukung urusan perindustrian.

Adapun capaian Sasaran Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing pada Sektor Perindustrian sebagaimana Tabel 3.75.

Tabel 3.75.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing Sektor
Perindustrian

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	27,55	34,86	35,94	103,10	35,2	102,10
2	Persentase IKM yang memiliki daya saing	2,5	5,50	1,80	32,73	7,5	24

1. Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB

Komponen pembentuk PDRB, sektor industri manufaktur dibentuk oleh sub sektor industri besar, menengah, kecil dan rumah tangga. Sektor industri sebagai sektor andalan memberikan andil yang besar bagi perekonomian di Kabupaten Klaten, yaitu memberikan sumbangan terhadap PDRB sebesar 34,54 % (atau Rp.12.412.507,52 juta) pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 menjadi sebesar 35,94 % (Rp.14.080.982,00 juta).

2. Persentase IKM yang Memiliki Daya Saing

Pada tahun 2017 sebanyak 34.672 IKM yang memiliki daya saing baru mencapai 4,5%, dan pada tahun 2018 menurun menjadi 1,80%, sehingga diperlukan upaya untuk terus dapat meningkatkan daya saing bagi IKM di Kabupaten Klaten. Penurunan ini disebabkan karena, banyaknya pekerja di sektor IKM yang beralih profesi dan lesunya pasar.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Meningkatkan Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2018, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis sasaran Meningkatkan Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing Sektor industri diantaranya dengan program:

1. Pengembangan industri kecil dan Menengah; dan
2. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.

Permasalahan :

- a. Terbatasnya akses dan perluasan pasar produk ekspor serta kurang berkembangnya kerjasama perdagangan internasional;
- b. Lemahnya daya saing dan belum optimalnya pengembangan mutu, desain dan merk dagang beberapa produk ekspor;
- c. Terbatasnya kemampuan SDM pelaku usaha di sektor IKM; dan
- d. Masih lemahnya legalisasi hak kekayaan intelektual terhadap produk – produk perindustrian unggulan Kabupaten Klaten;

Solusi :

- a. Peningkatan akses dan perluasan pasar produk ekspor dengan membuka kerjasama perdagangan internasional;
- b. Penguatan daya saing dengan pengembangan mutu, desain dan merk dagang beberapa produk ekspor;
- c. Optimalisasi pelaksanaan perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar; dan
- d. Peningkatan kemampuan kualitas SDM pelaku usaha IKM.

32. Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Publik dan Sarana Prasarana Dasar Masyarakat;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah, Pemerintah kabupaten diwajibkan melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang. Sementara ini kewajiban yang harus diperhatikan terkait prasarana jalan adalah : Total panjang jalan di Kabupaten Klaten yang termasuk ke dalam kategori jalan negara 45,272 km, jalan provinsi sepanjang 34,238 km dan jalan kabupaten sepanjang 769,63 km. Faktor-faktor penting yang perlu diperhatikan adalah aksesibilitas, mobilitas, dan keselamatan.

Luas area layanan irigasi di Kabupaten Klaten sebesar 1.608 ha yang tercakup dalam Daerah Irigasi (DI). Secara kewenangan, ada 2 (dua) DI yang menjadi kewenangan Pemerintah pusat, 5 (lima) DI yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 478 DI yang menjadi kewenangan Kabupaten Klaten. Dengan pembagian kewenangan itu, maka pengelolaan irigasi dilakukan dari APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBD Kabupaten Klaten maupun yang bersumber dari dana desa. Pengelolaan sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia. Disamping itu Pemerintah kabupaten diwajibkan pula serius untuk memenuhi kebutuhan pelayanan air bersih dan sanitasi masyarakat.

Adapun capaian sasaran “ Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyarakat “ disajikan pada Tabel 3.76.

Tabel 3.76.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Publik dan Sarana
Prasarana Dasar Masyarakat

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Indeks layanan infrastruktur	26,97	29,42	58,61	199,22	38,16	153,59

Untuk sasaran Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Publik dan Sarana Prasarana Dasar Masyarakat, di tahun 2018 target untuk indikator Indkes Layanan Insfrastruktur sebesar 29,42, terealisasi sebesar 58,61%. Ini berarti capaian kinerja di tahun 2018 sebesar 199,22%.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Publik dan Sarana Prasarana Dasar Masyarakat di Kabupaten Klaten yang ditunjang oleh indikator persentase jalan dalam kondisi baik sepanjang 471,86 Km (total panjang jalan 769,63 Km), drainase dalam kondisi baik baru mencapai 61,31% (471,86 Km), hal ini disebabkan karena pembangunan jalan tidak disertai pembangunan drainase, sehingga merupakan salah satu penyebab rusaknya kondisi jalan. Program pendukung pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Publik dan Sarana Prasarana Dasar Masyarakat, diantaranya:

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
2. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya; dan
3. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.

Permasalahan :

- a. Infrastruktur jalan dan jembatan banyak dalam kondisi rusak, sebagai akibat minimnya pemeliharaan dan peningkatan prasarana jalan dan jembatan.
- b. Belum terpenuhinya semua kebutuhan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya dalam mendukung pembangunan pertanian dan penyediaan air baku.
- c. Belum optimalnya fungsi sarana, prasarana dan utilitas umum (drainase).

- d. Belum optimalnya kinerja sarana dan prasarana air bersih, sanitasi terutama, di lingkungan masyarakat berpenghasilan rendah.
- e. Rendahnya kualitas pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung Pemerintah diakibatkan tidak dipatuhinya NSPM (Norma Standar Pedoman Manual) dan rendahnya sosialisasi serta pengawasan pelaksanaan NSPM.
- f. Belum optimalnya kinerja tim pembina jasa konstruksi di tingkat kabupaten dalam pembinaan sampai dengan pengawasan pelaksanaan jasa konstruksi.

Solusi :

- a. Peningkatan pemeliharaan dan peningkatan kualitas prasarana jalan dan jembatan;
- b. Pemenuhan secara bertahap kebutuhan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya dalam mendukung pembangunan pertanian dan penyediaan air baku;
- c. Optimalisasi fungsi sarana, prasarana dan utilitas umum (drainase);
- d. Optimalisasi kinerja sarana dan prasarana air bersih, sanitasi terutama, di lingkungan masyarakat berpenghasilan rendah;
- e. Sosialisasi serta pengawasan pelaksanaan NSPM (Norma Standar Pedoman Manual) untuk mengawasi pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung Pemerintah secara ketat; dan
- f. Peningkatan kinerja tim pembina jasa konstruksi di tingkat kabupaten dalam pembinaan sampai dengan pengawasan pelaksanaan jasa konstruksi.

33. Sasaran Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas dan penyelenggaraan angkutan;

Peningkatan jumlah sarana angkutan publik, menuntut ketersediaan prasarana perhubungan jalan yang memadai untuk pengangkutan barang dan jasa. Adapun kondisi sarana perhubungan pada saat ini dapat dicerminkan dari keberadaan sarana transportasi darat yang terdiri mobil barang, kendaraan khusus dan angkutan publik.

Adapun capaian sasaran "Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas dan penyelenggaraan angkutan" disajikan pada Tabel 3.77.

Tabel 3.77.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Sasaran Meningkatkan kualitas manajemen rekayasa lalu lintas dan
penyelenggaraan angkutan

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perhubungan	36,04	45,87	43,58	95,01	57,52	75,76

Pencapaian indikator tingkat pelayanan infrastruktur perhubungan meningkat dari tahun lalu 31,52% menjadi 43,58%, angka tersebut masih dibawah target yang ditetapkan pada tahun 2018 yaitu sebesar 45,87%. Prosentase tingkat realisasinya sebesar 95,01%, hal tersebut disebabkan karena target yang disampaikan merupakan target renstra pada tahun ke-3 (Tahun 2018) yang belum disesuaikan kedalam target Renja Tahun 2018 dengan melewati berapa kebijakan terkait pengurangan anggaran.

Pencapaian indikator tingkat pelayanan infrastruktur perhubungan sebagaimana tersebut di atas, didukung jumlah sarana angkutan (Umum dan Pribadi) disajikan pada Tabel 3.78.

Tabel 3.78.

Jumlah Sarana Angkutan (Umum dan Pribadi)
di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018

Jenis Kendaraan	Tahun (unit)				
	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01 Mobil Barang	10.819	11.049	10.657	9.622	9.001
02 Mobil Bus					
* Umum	344	386	464	397	395
<i>Bus Besar</i>	119	80	44	65	79
<i>Bus Sedang</i>	125	196	131	261	211
<i>Bus Kecil</i>	100	110	289	71	105
* Bukan Umum	199	155	137	105	114
03 Kendaraan Khusus / Alat Berat	3	9	9	6	6
Jumlah	11.709	11.985	11.731	10.527	9.911

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, 2018

Berdasarkan Tabel 3.78 sebagaimana tersebut di atas, jumlah terminal angkutan penumpang umum/sub terminal sebanyak 8 (delapan) lokasi untuk mendukung transportasi darat. Data terminal angkutan penumpang umum pada tahun 2018 disajikan pada Tabel 3.79.

Tabel 3.79.

Data Terminal Angkutan Penumpang Umum
Di Kabupaten Klaten Tahun 2018

No	Terminal	Alamat	Type	Luas
1	2	3	4	5
1	Penggung	Penggung, Ceper, Klaten	C	4500 m ²
2	Cawas	Cawas, Klaten	C	3000 m ²
3	Teloyo	Teloyo, Wonosari, Klaten	C	3310 m ²
4	Pasar Klaten	Klaten Tengah	C	600 m ²
5	Bendogantungan	Bendogantungan, Klaten Selatan	C	3168 m ²
6	Tulung	Tulung, Klaten	C	400 m ²
7	Manisrenggo	Manisrenggo, Klaten	C	1785 m ²
8	Delanggu	Karang, Klaten	C	7000 m ²

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, 2019.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas dan penyelenggaraan angkutan, dilaksanakan dengan program Peningkatan Pelayanan Angkutan.

Permasalahan:

1. Perlengkapan Jalan Terpasang belum Optimal
2. Tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas di bidang angkutan (ijin trayek, laik jalan dan angkutan galian golongan C)
3. Rendahnya kesadaran pemilik KBWU untuk mengujikan kendaraannya
4. Masih minimnya jumlah Traffic light ATCS yang telah terkoneksi dengan CCRoom
5. Pemasangan Rambu-rambu lalu lintas daerah perbatasan yang masih belum optimal
6. Ketertiban Administrasi dan Teknis di Pengujian kendaraan bermotor yang justru dikeluhkan masyarakat dan berbanding negatif terhadap retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Solusi:

Dari permasalahan yang dihadapi diatas, secara garis besar solusi terhadap permasalahan utama, diantaranya:

1. Meningkatkan tingkat pelayanan infrastruktur perhubungan; dan
2. Mengoptimalkan kualitas pelayanan perhubungan.

34. Sasaran Meningkatnya Pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan dan Pemukiman;

. Menghadapi tantangan dalam rangka peningkatan prasarana dasar permukiman khususnya kawasan permukiman padat, maka harus ditempuh dengan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukimannya. Masyarakat perlu ditingkatkan kesadarannya untuk mampu memelihara prasarana dasar permukiman yang ada di lingkungannya, dengan demikian sumber daya manusia di tingkat Pemerintahan desa dan kelurahan secara bertahap ditingkatkan kemampuannya, selain berkonsentrasi mengurus masalah administrasi Pemerintahan juga mampu memberdayakan masyarakat.

Keseluruhan lahan yang ada, tidak mungkin untuk dibangun sebagai kawasan permukiman, oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Klaten harus melakukan pembatasan kawasan untuk pembangunan perumahan, dan melakukan optimalisasi pemanfaatan lahan. Sementara ini tercatat sebanyak 379.404 unit rumah, dengan perincian: untuk tempat tinggal sebanyak 307.713 unit, campuran sebanyak 48.532 unit, dan bukan tempat tinggal sebanyak 23.159 unit.

Adapun capaian sasaran Meningkatnya Pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan dan Pemukiman sebagaimana Tabel 3.80

Tabel 3.80

**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan
Perumahan dan Pemukiman**

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2016			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2016 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Indeks kualitas perumahan dan kawasan permukiman	57,71	41,06	34,08	83	74,4	45,81

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Meningkatnya Pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas

Kawasan Perumahan dan Pemukiman di Kabupaten Klaten yang pergerakannya relatif lambat. Hal ini disebabkan karena, 1). Penanganan air minum layak, penduduk yang terlayani sistem air limbah yang layak sangat tergantung pada sumber pendanaan dari APBN. Sementara itu jumlah rumah tangga 182.324 unit, 2) penanganan kawasan kumuh perkotaan, sementara ini hanya bergerak di 2 (2 desa) titik sasaran dengan cakupan luasan 34,47 Ha. 3). Penanganan RTLH hanya bergerak pada kisaran 1087 unit pertahun, padahal jumlah RTLH masih sebanyak 24.775 unit.

Pada tahun 2016, program yang dilaksanakan untuk sasaran Meningkatkan Pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan dan Pemukiman terdiri dari 3 (tiga) program, diantaranya:

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah;
2. Program Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan; dan
3. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Permasalahan :

- a. Banyaknya rumah tidak layak huni, dan merata di setiap kecamatan.
- b. Belum optimalnya pemanfaatan lahan dengan pola pembangunan vertikal terutama pada kawasan-kawasan permukiman yang padat.
- c. Belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman.
- d. Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung permukiman (air bersih, sanitasi dan utilitas umum).
- e. Masih adanya kawasan kumuh perkotaan.

Solusi :

- a. Percepatan penanganan pembangunan rumah tidak layak huni;
- b. Mengoptimalkan upaya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman.
- c. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung permukiman (air bersih, sanitasi dan utilitas umum) layak melalui pelaksanaan Program Kotaku; dan
- d. Percepatan penanganan kawasan kumuh perkotaan dengan mengerakkan partisipasi masyarakat lewat CSR.

35. Sasaran Terkendalinya Pemanfaatan Kawasan Sesuai dengan Konsep Tata Ruang;

Peningkatan efektivitas Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai instrumen pembangunan secara konsisten digunakan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus mengintegrasikan aspek lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Kebijakan yang dimaksud adalah rangkaian konsep dan azas yang menjadi dasar rencana. Kebijakan, rencana dan atau program (KRP) yang disusun harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, juga selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.

Sehingga sebagai konsekwensi logis dari persoalan tersebut, KRP harus memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Sehingga pemanfaatan dan pengendalian ruang merupakan upaya yang terstruktur, dan sebagai terobosan dan memastikan bahwa pada setiap tahap awal penyusunan KRP sudah memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam pengertian, makna strategisnya sejak awal proses perencanaan dalam pengambil keputusan sudah mempertimbangkan hal-hal yang mendesak terkait pembangunan berkelanjutan.

Adapun capaian sasaran Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai dengan konsep tata ruang sebagaimana Tabel 3.81

Tabel 3.81
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Terkendalinya Pemanfaatan Kawasan Sesuai Dengan Konsep Tata Ruang

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2016			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2016 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Ketaatan terhadap RTRW	78,86	78,98	78,98	100	80,00	98,73

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Terwujudnya Tertib Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang dilaksanakan melalui Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Permasalahan :

- a. Kinerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) belum optimal dalam memfasilitasi pemecahan permasalahan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- b. Peningkatan efektivitas RTRW sebagai instrumen pembangunan secara konsisten digunakan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.
- c. Pengendalian pemanfaatan ruang belum dilaksanakan secara konsisten, hal ini disebabkan karena belum lengkapnya piranti peraturan penunjang.
- d. Belum kuatnya pengendalian pemanfaatan ruang melalui penyusunan rencana detail, penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian *insentif-desinsentif* serta pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang.
- e. Kurangnya pengembangan sarana informasi kepada masyarakat di bidang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan
- f. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya.

Solusi :

- a. Optimalisasi Kinerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) belum optimal dalam memfasilitasi pemecahan permasalahan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. Peningkatan efektivitas RTRW sebagai instrumen pembangunan secara konsisten digunakan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- c. Pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan secara konsisten, dan tidak tebang pilih; dan
- d. Penguatan pengendalian pemanfaatan ruang melalui penyusunan rencana detail, penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian *insentif-desinsentif* serta pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang.

36. Sasaran Terjaganya kualitas lingkungan hidup;

Sebagai upaya untuk menjaga kualitas lingkungan hidup, target indikator sasaran digunakan sebagai alat ukur pencapaian keberhasilan diantaranya: indeks kualitas air, indeks kualitas udara, dan cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dan penegakan hukum lingkungan. Masih rendahnya indeks kualitas air salah satu penyebabnya adalah tingginya pencemaran air oleh limbah domestik.

Adapun capaian sasaran "Terjaganya kualitas lingkungan" disajikan pada Tabel 3.82

Tabel 3.82

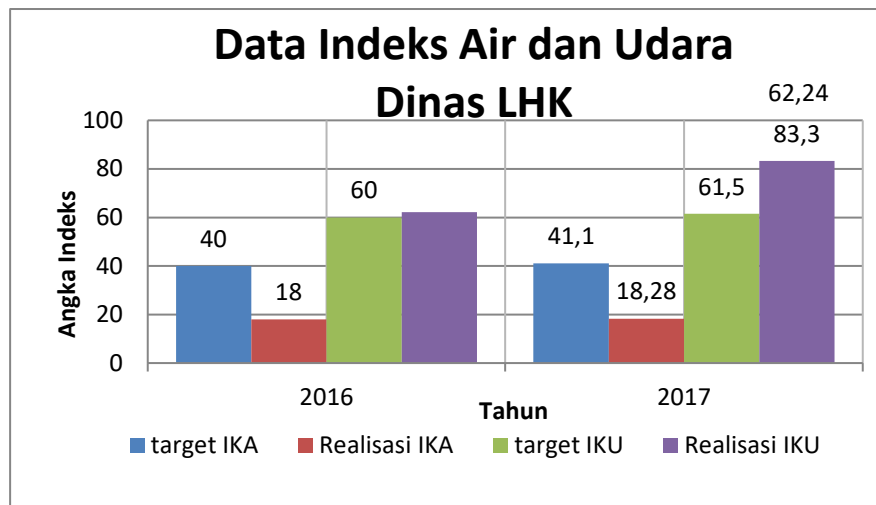
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Terjaganya Kualitas Lingkungan

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Indeks kualitas air	16,00	30,68	18,28	59,58	40,46	45,18
2	Indeks kualitas udara	60,00	74,68	83,3	111,54	84,46	98,63
3	Indeks tutupan vegetasi (lahan)	34,14	48,82	42,54	87,14	58,60	72,59

Target Indeks Kualitas Air (IKA) tahun 2018 sebesar 41,1 dengan capaian realisasi IKA sebesar 18,28 (44%) sedangkan target Indeks Kualitas Udara (IKU) pada tahun 2018 sebesar 74,68 telah melampaui target yang ditentukan dengan capaian sebesar 83,3 (135%). Uji sampling udara menggunakan metode pasive sampler dimana keakuratan lebih baik dan lebih mewakili uji kualitas udara di Kab. Klaten, pengambilan uji dilakukan selama 24 jam dengan pelaksanaan 2 kali dalam setahun pada 4 titik (kawasan padat penduduk, transportasi, industri dan perkantoran).

Pengambilan uji sampling kualitas air sungai dilakukan hanya beberapa titik menyesuaikan anggaran dan karena SDM yang terbatas serta antrian pada laboratorium lingkungan yang terakreditasi sangat panjang maka tahun 2018 ini hanya dapat dilakukan sekali dengan pengambilan sampling pada 26 titik dari 7 sungai yang ada di Kab. Klaten dari target 10 sungai. Adapun sungai yang dapat dipantau mutu airnya dengan pengambilan sample adalah sebagai berikut : Sungai Rowo Jombor, Sungai Modin, Sungai Soran, Sungai Pusur, Sungai Merbung, Sungai Kacang Ijo, dan Sungai Kroman. Ditambah hasil uji dari BKSDA sebanyak 3 sungai

yaitu Sungai Dengkeng, Sungai Jebol dan Sungai Pusur. (DAS Bengawan Solo). Indeks Kualitas air dan Kualitas udara disajikan pada Grafik 3.13



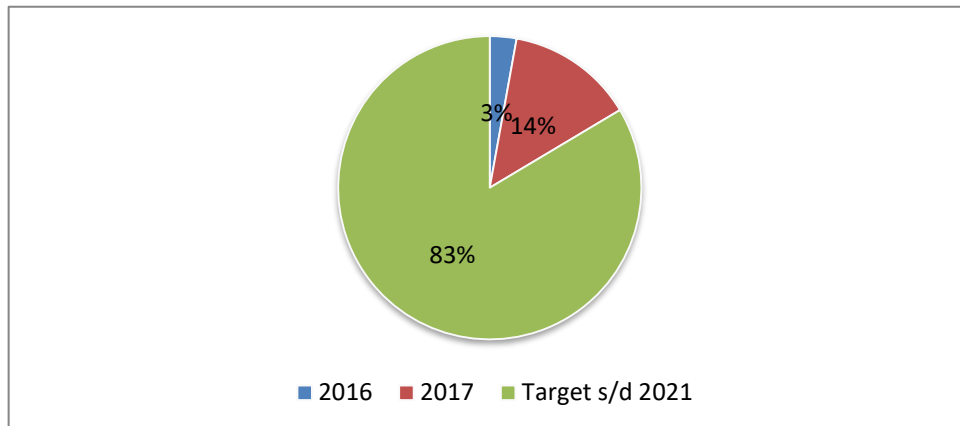
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019.
Grafik: 3.13 Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara.

Berdasarkan Grafik 3.13 sebagaimana di atas terlihat bahwa indeks air dibanding tahun lalu mengalami peningkatan sejumlah 0,28 poin dan indeks udara mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebanyak 20,9 poin. Kedua indeks tersebut diatas yaitu indeks kualitas air dan udara apabila digabung dengan indeks tutupan vegetasi/tutupan lahan dimana indeks tutupan lahan/vegetasi Kab. Klaten tahun 2018 sebesar 42,54 menjadi Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) dengan hasil perhitungan 47,49. Meningkat dibandingkan tahun lalu dimana IKLH Kab. Klaten 39,74, meskipun masih jauh dari target yang diharapkan akan tetapi telah terlihat jelas mengalami progres kenaikan. Dengan adanya komitmen semua pihak instansi terkait diharapkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten pada akhirnya sesuai dengan apa yang ditargetkan/diharapkan.

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dari target 100% terealisasi 100%. Data perusahaan yang wajib AMDAL sejumlah 9 dan telah dilaksanakan monitoring/pengawasannya.

Perhitungan penegakan hukum lingkungan berdasarkan data jumlah aduan yang masuk kepada Pemda dan diteruskan ke DLHK kemudian ditindaklanjuti sehingga aduan/masalah lingkungan yang ada di masyarakat Kabupaten Klaten dapat terfasilitasi atau terselesaikan. Adapun data selama tahun 2018 sebanyak 5 aduan masyarakat dimana 5 kasus sudah terselesaikan (100%). Hasil tahun 2018 lebih baik dari

pada tahun 2016 dimana persentase capaian indikator sasaran ditahun 2016 sebesar 83% menjadi 100% di tahun 2018.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019.

Grafik: 3. 14 Capaian Konservasi Penghijauan Daerah Sumber Mata Air Kabupaten Klaten Tahun 2016-2017 dan Target sampai tahun 2021.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran “Menjaga kualitas lingkungan hidup” dilaksanakan dengan program:

1. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
2. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.

Permasalahan:

1. Belum sinerginya antar pelaku pemangku kepentingan dalam mengelola lingkungan hidup; dan
2. Tingginya tingkat pencemaran limbah domestik.

Solusi:

Kewenangan dalam pengendalian IPAL domestik bukan menjadi kewenangan Dinas LHK melainkan Perwaskim sehingga diharapkan kedepan adanya program dan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengatasi permasalahan pencemaran limbah air domestik di sungai.

37. Sasaran Terwujudnya Pengurangan Kerentanan Resiko Bencana;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan perlunya pengaturan yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (Pasal 1 butir 10 UU PPLH).

Sehingga potensi dampak dan/atau resiko lingkungan yang mungkin ditimbulkan oleh suatu kebijakan, rencana, dan/atau program, sebelum pengambilan keputusan dilakukan, dapat diantisipasi. Dampak dan/atau resiko lingkungan yang mungkin timbul oleh suatu kebijakan, rencana, dan/atau program, oleh Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 dikategorisasikan, antara lain sebagai potensi: meningkatkan resiko perubahan iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan atau kepunahan, keanekaragaman hayati, banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam, mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat, dan/atau meningkatkan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Berbagai hal tersebut di atas, perlu ada upaya pengurangan kerentanan resiko bencana dengan cara menggerakkan partisipasi masyarakat. Salah satu bentuk upaya tersebut perlunya penguatan masyarakat dengan menciptakan desa tangguh bencana dengan berbagai instrumen yang diperlukan.

Adapun capaian sasaran Terwujudnya Pengurangan Kerentanan Resiko Bencana sebagaimana Tabel 3.83.

Tabel 3.83

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Terwujudnya Pengurangan Kerentanan Resiko Bencana

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Kelas Indeks kapasitas bencana)	0	Sedang (119)	Sedang (123,20)	103,53	Sedang	Sedang

Pada tahun 2018 target untuk sasaran Terwujudnya Pengurangan Kerentanan Resiko Bencana adalah kelas sedang (119) dan realisasinya juga

kelas sedang tetapi dengan angka capaian yang lebih tinggi yaitu 123,20. Sehingga capaian untuk tahun 2018 sebesar 103,53.

Pada tahun 2018 upaya untuk mewujudkan desa tangguh bencana belum optimal, sementara ini baru diupayakan dengan rintisan “**desa paseduluran**” dan Kabupaten Tangguh Bencana, serta untuk mendukung pencapaian sasaran “*Terwujudnya Pengurangan Kerentanan Resiko Bencana*” di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2018, program yang dilaksanakan untuk sasaran Terwujudnya Pengurangan Kerentanan Resiko Bencana dengan program, diantaranya:

1. Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
2. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana; dan
3. Program Peningkatan Pengelolaan logistik;

Permasalahan :

1. Masih rendahnya perencanaan berbasis mitigasi bencana; dan
2. Sulitnya persyaratan dan dukungan pembiayaan desa tangguh bencana.

Solusi :

1. Mendorong dan penguatan kelembagaan perencanaan berbasis mitigasi bencana secara terpadu;
2. Peningkatan dan pemihakan kebijakan desa tangguh bencana secara massif.

38. Sasaran Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Politik dan Demokrasi;

Memperhatikan luas wilayah 65.556 ha (655,56 km²) yang mencakup 26 Kecamatan, 391 Desa serta 10 Kelurahan, sementara ini diukur dari jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk baru pada kisaran 89,83 dengan rasio Pos Siskamling per jumlah penduduk sudah mencapai kisaran angka 2,49, dan cakupan penegakan Perda baru mencapai 90,91 hal ini disebabkan karena luasan wilayah, jumlah penduduk serta kompleksitas permasalahan kemasyarakatan tidak sebanding dengan jumlah Linmas. Sehingga perlunya pemberdayaan masyarakat dalam ikut menjaga ketentraman dan ketertiban untuk menekan angka kriminalitas menjadi alternatif dalam menjaga kondusivitas daerah.

Adapun capaian sasaran “*Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Politik dan Demokrasi*” sebagaimana Tabel 3.84

Tabel 3.84

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kesadaran Dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Politik Dan Demokrasi

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2016			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2016 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Indeks Demokrasi	69,75	75	70,85	94,47	75,7	93,59

Angka kriminalitas dari tahun ke tahun dapat ditekan, karena dukungan masyarakat. Namun masalah PMKS yang seringkali menjadi pemicu tersumbatnya demokrasi belum juga bisa diatasi. Dimana PMKS yang memperoleh bantuan sosial belum bisa memenuhi target karena keterbatasan pembiayaan. Dari sebanyak 119.489 penyandang PMKS baru bisa ditangani sebanyak 48.729 PMKS, sehingga perlunya antisipasi cipta kondisi sosial budaya menjadi mendesak untuk dilakukan. Pada tahun 2018, program yang dilaksanakan untuk sasaran Meningkatkan Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Politik dan Demokrasi diantaranya:

1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan; dan
2. Program Peningkatan dan Pembinaan Kehidupan Sosial Politik;

Permasalahan:

- a. Masih munculnya berbagai penyakit masyarakat;
- b. Adanya ancaman pergerakan terorisme yang berkembang di Klaten;
- c. Masih rendahnya kualitas politik masyarakat.

Solusi :

- a. Pengendalian dan pencegahan dini munculnya berbagai penyakit masyarakat;
- b. Pembinaan kualitas politik masyarakat yang bermartabat dan kepribadian Indonesia.

39. Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya;

Ukuran keberhasilan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya diantaranya diukur dengan indikator Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan). Pada tahun 2018 tercatat sebanyak 391 desa, dan 10 kelurahan, dengan jumlah kecamatan 10 merupakan target sasaran pembinaan dan fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya melalui lembaga desa untuk menuju ketahanan desa dan kemandirian desa.

Adapun capaian sasaran “ Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya “ disajikan pada Tabel 3.85.

Tabel 3.85

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok Pelestarian Adat
dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan)	16	49	49	100	100	49

Pada tahun 2018 target untuk sasaran Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya sebanyak 49 dan realisasinya juga sebanyak 49. Sehingga capaian untuk tahun 2018 sebesar 100%.

Berdasarkan capaian Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya sebagaimana Tabel 3.85 di atas, per kelompok rata-rata sebanyak 49 orang apabila diakumulasi dengan jumlah desa/kelurahan sudah merupakan modal sosial untuk melestarikan adat dalam pengembangan kehidupan sosial yang

memadai. Tinggal bagaimana pembinaan dan fasilitasi kegiatan dapat dilakukan dengan baik.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya yang didukung dengan program, diantaranya:

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa;
2. Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga; dan
3. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan.

Permasalahan :

- a. Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya untuk menjaga keutuhan suatu bangsa;.
- b. Kurangnya sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait, dalam pelaksanaan Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya;
- c. Belum adanya sarana informasi Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas.

Solusi :

- a. Peningkatan sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya ; dan
- b. Peningkatan sarana informasi Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas.

40. Sasaran Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;

Ukuran keberhasilan Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat diantaranya diukur dengan indikator Indeks ketertiban masyarakat. Di Kabupaten Klaten dengan luas wilayah 65.556 ha (655,56km²) yang mencakup 26 Kecamatan, 391 Desa serta 10 Kelurahan, diperlukan sejumlah Linmas per jumlah 10.000 jiwa, rasio pos kamling per jumlah penduduk dan cakupan penegakan perda.

Adapun capaian sasaran “Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat” disajikan pada Tabel 3.86

Tabel 3.86

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Indeks ketertiban masyarakat	90	95	92,20	97,05	100	92,20

Sumber: Satpol PP, 2019.

Pada Tahun 2018 jumlah Linmas per 10.000 penduduk baru bekisar 89,83, rasio pos kamling per jumlah penduduk mancapai angka 2,49, sedangkan untuk penegakkan perda mencapai 90,91.

Untuk tahun 2018 target sasaran Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebanyak 95 dan realisasinya sebanyak 92,90. Sehingga capaian untuk tahun 2018 sebesar 97,05.

Jenis kegiatan untuk mendukung pencapaian urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan yang dilaksanakan diantaranya: koordinasi pengamanan wilayah, optimalisasi peran Peningkatan Kinerja Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Toma/ga dan lembaga lainnya, Penegakan Perda, Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, dan Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Hal tersebut juga diharapkan mampu untuk mencegah, menekan, dan/atau menyelesaikan terjadinya konflik sosial maupun konflik yang dilatarbelakangi masalah SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan). Berbagai permasalahan yang dihadapi bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan, diantaranya:

1. Penyakit Masyarakat

Data yang tersaji tentang berbagai penyakit masyarakat didapatkan berdasarkan Hasil operasi penertiban pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT), data tersebut adalah mengenai data pelacuran dan peredaran minuman keras/beralkohol. Salah satu jenis penyakit masyarakat yang menonjol yaitu kasus pelacuran dalam kurun waktu Tahun 2014-2018 kasusnya bersifat fluktuatif, data kondisinya disajikan pada Tabel 3.87.

Tabel 3.87.

Rekapitulasi Data Hasil Operasi Penertiban Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Tahun 2014-2018

No	Tahun	Jumlah kegiatan	Hasil operasi penertiban					
			PGOT		PSK/ WTS	Pasangan Tidak Resmi	Anjal/punk	
			Pria	Wanita			Pria	Wanita
1	2014	10	4	8	8	38	8	7
2	2015	10	11	5	10	50	8	2
3	2016	12	14	7	8	46	12	4
4	2017	15	15	8	6	58	12	14
5	2018	15	8	6	10	78	18	7

SANKSI

- Bagi WTS/PSK dan Anjal wanita langsung dikirim ke Barehsos WANODYATAMA Surakarta selama 6 bulan ;
- Bagi Anjal pria dikirim ke PPSA Mandiri Semarang ;
- Bagi PGOT yang terjaring diserahkan ke Rumah Singgah Klaten guna assesment dan tindak lanjut;
- Bagi Pasangan tidak resmi diwajibkan wajib lapor pembinaan sebanyak 20 kali di SATPOL PP.

Sumber: Satpol PP Kab. Klaten, 2019

Berdasarkan Tabel 3.87 sebagaimana tersebut di atas, trend pelanggaran Peraturan Daerah khususnya masalah penyakit masyarakat semakin besar jumlahnya dibandingkan jumlah pelanggaran Peraturan Daerah secara umum, hal ini disebabkan:

- a. Tingkat kesadaran warga masyarakat yang rendah;
- b. Kurangnya sosialisasi peraturan daerah dimaksud sampai kepedesaan/pelosok;
- c. Persaingan ekonomi dan gaya hidup kekinian mendorong masyarakat dan remaja melakukan perbuatan yang cenderung kriminal dan mengganggu ketertiban umum; dan
- d. Penerapan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan daerah belum mampu membuat efek jera para pelanggar.

Berikut Rekapitulasi Hasil Operasi Penertiban Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Jenis Minuman Keras/ Beralkohol selama tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 3.88.

Tabel 3.88.

Rekapitulasi Hasil Operasi Penertiban Pemberantasan
Penyakit Masyarakat (PEKAT) Jenis Minuman Keras/ Beralkohol
Tahun 2014-2018

No	Tahun	Jumlah kegiatan	Hasil Operasi Penertiban			
			Ciu	Vodka	Anggur putih	Anggur merah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	2014	6	120 liter	60 botol	10 dus	20 dus
2	2015	6	200 liter	40 botol	5 dus	4 dus
3	2016	4	60 liter	-	2 dus	2 dus
4	2017	3	50 liter	48 botol	4 dus	6 dus
5	2018	0	0	0	0	0
SANKSI						
- Barang bukti miras diserahkan ke Polres guna pemusnahan terpadu;						
- Para pelaku pelanggaran dilakukan tipiring oleh Penyidik Polres Klaten.						

Sumber: Satpol PP Kab. Klaten, 2019.

Berdasarkan Tabel 3.88 sebagaimana tersebut di atas, minuman keras/beralkohol yang ditemukan berdasarkan hasil operasi penertiban pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) jumlahnya juga bersifat fluktuatif. Hal ini tergantung pada situasi sosial budaya masyarakat yang sering kali menjadi baluran tindak kriminal yang mengiringinya.

2. Ancaman Terorisme

Adanya Ancaman Terorisme, Konflik SARA (baik Vertikal maupun Horizontal) dan gerakan yang bersifat radikalisme yang kadang bersifat laten serta kenakalan remaja masih sering terjadi. Kondisi permasalahan ketentraman umum selama tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 3.89.

Tabel 3.89

Kondisi Jenis Permasalahan Ketentraman Umum
Tahun 2014-2018

No.	Jenis Permasalahan	Tahun (Jumlah Kejadian)				
		2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Ancaman Terorisme	7	-	17	-	-
2.	Konflik Sara	5	-	17	3	1
3.	Gerakan Radikalisme	3	4	21	9	2
4.	Kenakalan Remaja	4	3	4	3	4

Sumber: Kantor Kesbangpol, 2018

Berdasarkan Tabel 3.89 sebagaimana tersebut di atas jenis permasalahan ketentraman umum di Kabupaten Klaten secara umum mengalami penurunan. Ancaman terorisme hanya terjadi pada tahun 2014 dan tahun 2016 yaitu sebanyak 7 dan 17 kasus. Sedangkan konflik terjadi terbanyak pada Tahun 2016 yaitu sebanyak 17 kasus. Rata-rata jumlah dari jenis permasalahan di Tahun terakhir mengalami penurunan hal ini disebabkan karena intensifnya kegiatan forum kerukunan umat beragama untuk meminimalisir konflik SARA.

3. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas dirumuskan: Jumlah kriminalitas tertangani/jumlah penduduk X 10.000 (lampiran permendagri 86 Tahun 2017) maka diperoleh data angka kriminalitas sebagai berikut :

a. Tahun 2015 : 3,94.

Jumlah kriminalitas tertangani 509 kasus dibagi jumlah penduduk 1.292.013 dikali 10.000.

b. Tahun 2016 : 4,19

Jumlah kriminalitas tertangani 546 kasus dibagi jumlah penduduk 1.300.706 dikali 10.000.

c. Tahun 2017 : 3,25

Jumlah kriminalitas tertangani 424 kasus dibagi jumlah penduduk 1.304.519 dikali 10.000.

(Sumber Polres Klaten dan Dinas Dukcapil Kab. Klaten)

Angka Kriminalitas belum bisa ditekan, hal ini disebabkan beberapa permasalahan, diantaranya: 1). Bentuk dan modus kejahatan (tindak pidana) pun terus berkembang, sehingga penanganannya pun harus beda. 2). Selain itu meningkatnya tindak kriminal disebabkan persoalan seperti, ekonomi, sosial, konflik dan rendahnya kesadaran hukum, kemajuan teknologi informasi yang mendorong terjadinya bentuk-bentuk tindak yang didasari atau pun tidak. 3). Selain itu rendahnya ketaatan pelaksanaan terhadap perda/perbup karena kurangnya sosialisasi, dan terbatasnya sumber daya manusia aparat penegak Perda/Perbup.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran “Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat” yang didukung dengan program Pemeliharaan ketentraman masyarakat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Permasalahan :

- a. Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat untuk menjaga keutuhan suatu bangsa;
- b. Kurangnya sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait, dalam pelaksanaan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- c. Belum adanya sarana informasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan masyarakat lebih senang mengkonsumsi berita hoax sebagai komoditas politik.

Solusi :

- a. Peningkatan sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ; dan
- b. Peningkatan sarana informasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas untuk melawan berita *hoax*.

41. Sasaran Meningkatnya Kapasitas Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak;

Peningkatan kapasitas perempuan, dan Perlindungan perempuan dan anak merupakan salah satu agenda penting dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021, mengingat jumlah anak di Kabupaten Klaten pada tahun 2018 telah mencapai 411.599 jiwa (atau 31,40% dari total jumlah penduduk). Penyebaran jumlah penduduk yang tidak merata, serta besarnya jumlah jiwa sudah barang tentu akan terkait dengan masalah pangan, gizi, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan khusus anak menjadi hal krusial yang harus diwujudkan untuk melindungi anak dengan cara penguatan kelembagaan anak, perlunya hak sipil dan kebebasan, serta perlindungan khusus terhadap tumbuh kembang anak. Data menunjukkan 14,47 persen penduduk Indonesia termasuk dalam kelompok sangat rawan pangan (asupan kalori <1.400 Kkal/orang/hari), 5,38 persen prevalensi gizi kurang hal ini menunjukkan bahwa *foodborne disease* merupakan masalah kesehatan masyarakat yang perlu diantisipasi.

Secara khusus, peningkatan kapasitas perempuan diukur dengan indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Sedangkan kondisi umum pencapaian dan permasalahan yang dihadapi perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Klaten, diantaranya terkait : (1). Penguatan kelembagaan, (2). Hak sipil dan kebebasan, (3). Lingkungan keluarga dan

pengasuhan alternatif, (4). Kesehatan dasar dan kesejahteraan, (5). Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan kreatif, serta (6). Perlindungan khusus.

Adapun capaian sasaran Meningkatnya Kapasitas Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak “ disajikan pada Tabel 3.90

Tabel 3.90

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Kapasitas Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	59,95	60,16	59,60	99,07	60,37	98,72
2	Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)	Madya	Nindya (750)	Madya (650)	86,67	Nindya (750)	86,67

Sumber: Dinas Sosial, P3AKB, 2019.

Indikator kinerja keberhasilan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diukur dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Gender (IPG);

Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2014-2018 menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan meskipun pada tahun 2016 sempat mengalami penurunan. Peningkatan ini disebabkan adanya komitmen pemerintah Daerah untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan, hanya saja peningkatan ini perlu ditunjang dengan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender yang optimal. Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 3.91.

Tabel 3.91.

Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018

Indikator	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
IPG	95,90	95,90	73,97	96,54	96,62

Sumber : Dinsos P3AKB, 2019.

Berdasarkan Tabel 3.91 sebagaimana tersebut di atas, selama dua tahun terakhir IPG mengalami peningkatan sebesar 0,08 % dari tahun 2017 sebesar 96,54 % menjadi 96,62 pada tahun 2018. Peningkatan ini disebabkan adanya kerjasama yang baik antara pemangku kepentingan melalui penguatan lembaga P2TP2A, dan dukungan penganggaran responsif gender.

2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) selama tahun 2014-2018 menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan meskipun pada tahun 2017 sempat mengalami penurunan. Peningkatan ini disebabkan adanya komitmen pemerintah Daerah untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan. Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 3.92.

Tabel 3.92.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Klaten Periode 2014-2018

No.	Indikator	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
2	Perempuan Sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)	49,44	52,74	49,7	47,65	51,16
3	Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Kerja (%)	37,53	37,69	37,72	37,76	37,52
4	IDG	59,72	59,95	59,72	59,50	59,60

Sumber : Dinsos Sumber: Dinas Sosial dan P3AKB, 2019.

Berdasarkan Tabel 3.92 sebagaimana tersebut di atas bisa dilihat perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) selama tahun 2014-2018 bersifat relatif fluktuatif, hal ini dikarenakan budaya *patriarki* yang masih kuat. Hal ini termanifestasi dalam bentuk stereotype, marginalisasi, subordinasi, tindak kekerasan dan beban ganda sehingga hal ini menyebabkan adanya deskriminasi pada upah pekerja perempuan di sektor non formal.

3. Peran Perempuan dalam Pemerintahan

Partisipasi perempuan dalam pembangunan dapat dilihat dari posisi perempuan dalam jabatan eksekutif dan legislatif selama tahun 2014-2018 relatif stagnan, hal ini disebabkan karena masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap perempuan untuk menduduki posisi jabatan eksekutif dan legislatif. Perkembangan keterwakilan peran perempuan dalam jabatan pemerintahan, dan Lembaga Perwakilan Rakyat selama tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 3.92.

Tabel 3.93.

Keikutsertaan Perempuan di dalam Jabatan Eksekutif dan Legislatif di Kabupaten Klaten tahun 2014-2018

No.	Jenis Jabatan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Eksekutif (%)	(7.159/24.195) = 29,6	(7.417/26.518) = 27,97	(7.072/27.344) = 25,86	56,6	57
2	Legislatif (%)	(3/50) = 6,00	(3/50) = 6,00	(3/50) = 6,00	(3/50) = 6,00	(3/50) = 6,00

Sumber: Kabupaten Klaten Dalam Angka (2018), diolah.

Berdasarkan Tabel 3.93. sebagaimana tersebut di atas, Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif Kabupaten Klaten stagnan karena masih dalam satu periode DPRD, hanya dalam jabatan eksekutif mulai tahun 2017 persentasenya meningkat, hal ini seiring dengan peningkatan kualitas dan kemampuan perempuan dalam mengisi formasi jabatan publik.

4. Perlindungan Anak

Upaya perlindungan anak dan perempuan ditunjukkan dengan meningkatnya penyelesaian terhadap kasus kekerasan yang berbasis gender dan anak disebabkan karena secara intensif telah dilakukan sosialisasi tentang hukum dan peraturan lainnya berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak kepada masyarakat. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilihat pada Tabel 3.94.

Tabel 3.94.

Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berhadapan Dengan Hukum di Kabupaten Klaten 2014-2018

Tahun	Fisik		Psikis		Seksual		Penelantaran		Trafficking		Jumlah
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2014	6	41	0	4	0	62	0	8	0	0	121
2015	7	10	2	0	2	18	0	3	0	0	42
2016	11	16	2	8	0	29	0	6	0	1	73
2017	9	6	3	5	0	12	0	7	1	0	43
2018	7	8	2	5	0	22	1	6	0	0	51

Sumber : P2TP2A Kabupaten Klaten, 2019

Berdasarkan Tabel 3.94. sebagaimana tersebut di atas, selama dua tahun terakhir jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berhadapan dengan hukum (ABH) mengalami peningkatan sebesar 8 kasus dari tahun 2017 sebesar 43 kasus menjadi 51 kasus di tahun 2018, hal ini disebabkan belum optimalnya perlindungan perempuan dan anak dalam menghadapi kekerasan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Peningkatan Kapasitas Perempuan, dan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Klaten didukung dengan program:

1. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
2. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.

Permasalahan :

- a. Masih kurangnya kebijakan pembangunan yang berpihak pada perempuan dan anak;
- b. Lemahnya kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
- c. Masih adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- d. Sistem kesejahteraan dan perlindungan anak belum memadai.

Solusi :

- a. Peningkatan kebijakan pembangunan yang berspektif perempuan dan anak;
- b. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
- c. Peningkatan pendampingan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan; dan
- d. Peningkatan sistem kesejahteraan dan perlindungan anak.

42. Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Perhubungan;

Ukuran keberhasilan meningkatnya kualitas layanan perhubungan diantaranya diukur dengan indikator Indeks kepuasan layanan perhubungan. ketersediaan prasarana perhubungan jalan yang memadai untuk pengangkutan barang dan jasa. Adapun kondisi sarana perhubungan pada saat ini dapat dicerminkan dari keberadaan sarana transportasi darat yang terdiri mobil barang, kendaraan khusus dan angkutan publik.

Adapun capaian sasaran “Meningkatnya kualitas layanan perhubungan “ disajikan pada Tabel 3.95.

Tabel 3.95
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Kualitas Layanan Perhubungan

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Indeks kepuasan layanan perhubungan	75,99	79,02	78,95	99,91	81,08	97,37

Dari tabel 3.95 dapat dilihat bahwa target sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Perhubungan tahun 2018 sebesar 79,02 dalam realisasinya tercapai sebesar 78,95. Sehingga capaian kinerja tahun 2018 untuk sasaran tersebut sebesar 99,91%.

Jumlah sarana angkutan (Umum dan Pribadi) disajikan pada Tabel 3.96.

Tabel 3.96.
Jumlah Sarana Angkutan (Umum dan Pribadi)
di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018

Jenis Kendaraan	Tahun (unit)				
	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01 Mobil Barang	10.819	11.049	10.657	9.622	9.001
02 Mobil Bus					
* Umum	344	386	464	397	395
<i>Bus Besar</i>	119	80	44	65	79
<i>Bus Sedang</i>	125	196	131	261	211
<i>Bus Kecil</i>	100	110	289	71	105
* Bukan Umum	199	155	137	105	114
03 Kendaraan Khusus / Alat Berat	3	9	9	6	6
Jumlah	11.709	11.985	11.731	10.527	9.911

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, 2018

Berdasarkan Tabel 3.96. sebagaimana tersebut di atas, jumlah terminal angkutan penumpang umum/sub terminal sebanyak 8 (delapan) lokasi untuk mendukung transportasi darat. Data terminal angkutan penumpang umum pada tahun 2018 disajikan pada Tabel 3.97.

Tabel 3.97.

Data Terminal Angkutan Penumpang Umum
di Kabupaten Klaten Tahun 2018

No	Terminal	Alamat	Type	Luas
1	2	3	4	5
1	Penggung	Penggung, Ceper, Klaten	C	4500 m ²
2	Cawas	Cawas, Klaten	C	3000 m ²
3	Teloyo	Teloyo, Wonosari, Klaten	C	3310 m ²
4	Pasar Klaten	Klaten Tengah	C	600 m ²
5	Bendogantungan	Bendogantungan, Klaten Selatan	C	3168 m ²
6	Tulung	Tulung, Klaten	C	400 m ²
7	Manisrenggo	Manisrenggo, Klaten	C	1785 m ²
8	Delanggu	Karang, Klaten	C	7000 m ²

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, 2019.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Perhubungan yang didukung dengan program Peningkatan Pelayanan Angkutan.

Permasalahan :

- a. Tingginya mobilitas penduduk, diperlukan sarana perhubungan massal yang terjangkau dan mudah. Namun banyak kondisi angkutan umum yang sudah tidak laik jalan;
- b. Kurangnya sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait, dalam pelaksanaan pemenuhan layanan perhubungan;
- c. Belum optimalnya sarana informasi layanan perhubungan yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas.

Solusi :

- a. Peningkatan sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait layanan perhubungan ; dan
- b. Peningkatan sarana informasi layanan perhubungan yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas.

43. Sasaran Meningkatnya Pelayanan Perijinan Satu Pintu yang Tepat Waktu, Tepat Mutu, Tepat Sasaran dan Tepat Manfaat;

Ukuran keberhasilan Meningkatnya pelayanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh melalui survei.

Adapun capaian sasaran "Meningkatnya pelayanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat" disajikan pada Tabel 3.98.

Tabel 3.98

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Pelayanan Perizinan Satu Pintu Yang Tepat Waktu, Tepat Mutu,
Tepat Sasaran dan Tepat Manfaat

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan	84,50	79,52	80,52	101,26	80,00	100,65

Berdasarkan capaian pelayanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat sebagaimana Tabel 3.98 di atas, pada tahun 2018 tercatat kinerja layanan satu pintu diukur dari jumlah penerbitan Surat Izin Usaha berdasarkan jenis usaha: 1. Perusahaan kecil sebanyak 61 izin usaha, 2. Perusahaan menengah sebanyak 367 izin usaha, dan 3. Perusahaan besar sebanyak 73 izin usaha. Sedang izin ganggu (HO) menurut bentuk badan usaha, diantaranya: 1. Perusahaanan terbatas(PT) sebanyak 46 PT, 2. CV sebanyak 73, dan 3. Lainnya sebanyak 193 HO. Berdasarkan tanggapan penggunaan layanan ketika disurvei secara mandiri oleh Dinas Penanaman Modal, dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, nilai survei kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan sudah mencapai 80,52 (artinya memuaskan).

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran pelayanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat yang didukung dengan program Penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah.

Permasalahan :

- a. Kurangnya sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait, dalam pelaksanaan pemenuhan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat; dan
- b. Belum optimalnya sarana informasi layanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas.

Solusi :

- a. Peningkatan sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait layanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat ; dan
- b. Peningkatan sarana informasi layanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas.

44. Sasaran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Berkualitas;

Ukuran keberhasilan peningkatan kualitas pelayanan publik tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat diantaranya diukur pada layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Pada tahun 2018 tercatat sebanyak 992.889 orang penduduk yang wajib KTP, dari sebanyak 1.300.706 orang.

Adapun capaian sasaran "Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Berkualitas" sebagaimana Tabel 3.99

Tabel 3.99

**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Berkualitas**

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Indeks kepuasan layanan masyarakat	75	80	82,74	103,43	82,5	100,30

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2019.

Dari tabel 3.99 dapat dilihat bahwa target sasaran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Berkualitas tahun 2018 sebesar 80 dalam realisasinya tercapai sebesar 82,74. Sehingga capaian kinerja tahun 2018 untuk sasaran tersebut sebesar 103,43. Target bisa tercapai dikarenakan :

1. Adanya pelayanan keliling Adminduk yang dilaksanakan di kecamatan, kelurahan/desa dan sekolah;
2. Adanya layanan jemput bola bagi penduduk penyandang disabilitas, orang sakit dan penduduk yang tidak mampu datang sendiri ke Dinas Dukcapil;
3. Tersedianya gedung Dinas Dukcapil yang baru dimana masyarakat bisa dilayani secara nyaman dan berkualitas;
4. Tersedianya sarana dan prasarana untuk pelayanan Adminduk;
5. Adanya kualitas sumber daya manusia yang kapabel dalam memberikan pelayanan Adminduk kepada masyarakat;
6. Adanya dukungan dana dari Dirjen Dukcapil untuk meningkatkan kualitas pelayanan Adminduk; dan
7. Adanya pembaruan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang berdampak pada cepatnya pelayanan Adminduk.

Pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil meliputi 3 (tiga) bidang, yaitu : (i) Pendaftaran Penduduk, (ii) Pencatatan Sipil, dan (iii) Pengelolaan Informasi Kependudukan. Pendaftaran Penduduk dengan produk Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan Kependudukan (SKK). Pencatatan Sipil dengan produk Akte Kelahiran, Akte Kematian, Akte Perkawinan, Akte Pengangkatan Anak dan Akte Pengakuan/ Pengesahan Anak. Pengelolaan Informasi Kependudukan dengan produk data/informasi kependudukan yang berupa olahan proses dari pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Perkembang jumlah pelayanan akte di Kabupaten Klaten Tahun 2014–2018 disajikan pada Tabel 3.100

Tabel 3.100

Jumlah Pelayanan Akte di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018

No	Jenis Akte	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kelahiran	27.550	23.503	22.356	23.256	27.755
2	Kematian	285	1.336	615	1.400	2.116
3	Perkawinan	435	595	441	450	473
4	Perceraian	56	58	58	58	71

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2019.

Berdasarkan Tabel 3.100. sebagaimana tersebut di atas, untuk mewujudkan penerapan *single identity number* program e-KTP sampai dengan tahun 2018 baru tercatat penduduk yang ber-KTP sebanyak 945.832 orang.

Kondisi masyarakat Kabupaten Klaten yang belum memiliki kartu identitas (baik kartu identitas dalam bentuk akta lahir dan Kartu Tanda Penduduk) dalam kurun waktu tahun 2014-2018 cenderung menurun, hal ini dapat dilihat dari Tabel 3.101 Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen resmi kependudukan ini sudah terjadi peningkatan dari tahun ke tahun meskipun belum signifikan. Sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Klaten yang belum memiliki Akte Lahir dan KTP Elektronik tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 3.101

Tabel 3.101

Penduduk Kabupaten Klaten yang Belum ber-Akte Lahir dan KTP Elektronik Tahun 2014-2018

No.	Tahun	Belum Memiliki Akte Lahir	Belum Memiliki KTP Elektronik
1	2014	1.104.326	188.574
2	2015	967.452	106.872
3	2016	927.310	93.846
4	2017	894.986	91.538
5	2018	877.190	71.223

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2019.

Berdasarkan Tabel 3.101. sebagaimana tersebut di atas jumlah jumlah penduduk Kabupaten Klaten yang belum memiliki Akte Lahir dan KTP Elektronik tahun 2014-2018 cenderung turun, hal ini disebabkan karena validasi data kependudukan mewujudkan penerapan *single identity number* program e-KTP.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Berkualitas, yaitu Program Penataan Administrasi Kependudukan.

Permasalahan :

- a. Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya dokumen resmi kependudukan.
- b. Kurangnya sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait, dan
- c. Belum adanya sarana informasi kependudukan dan catatan sipil yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas.

Solusi :

- a. Peningkatan sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait dalam penanganan administrasi kependudukan; dan
- b. Peningkatan sarana informasi kependudukan dan catatan sipil yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas.

45. Sasaran Pengembangan Ketrasmigrasian;

Ukuran keberhasilan pengembangan ketrasmigrasian diukur dengan indikator Persentase besaran peningkatan minat transmigrasi. Selama tahun 2014-2018 sasaran transmigrasi di daerah: Kalimantan, Sulawesi dan Sumatra, namun mulai tahun 2017-2018 tinggal Sumatra saja yang menjadi tujuan transmigrasi.

Adapun capaian sasaran “ *Pengembangan Ketrasmigrasian* “ disajikan pada Tabel 3.102

Tabel 3.102

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Pengembangan Ketrasmigrasian

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Persentase besaran peningkatan minat transmigrasi	-64,62	40,50	-80	-197,53	42	-190,48

Peta penyebaran penempatan transmigrasi menurut daerah penempatan tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 3.103.

Tabel 3.103.

Realisasi Penempatan Transmigrasi Umum Menurut Daerah Penempatan Tahun 2014-2018

TAHUN	Sumatra		Kalimantan		Sulawesi	
	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2014	-	-	4	15	-	-
2015	5	23	2	7	-	-
2016	5	20	10	46	4	17
2017	4	13	-	-	-	-
2018	7	28	-	-	-	-

Sumber : Disperinaker Kabupaten Klaten, 2019.

Berdasarkan Tabel 3.103. sebagaimana tersebut di atas, pengiriman transmigrasi dari tahun ke tahun mengalami penurunan, hal ini dikarenakan berkurangnya quota penempatan transmigran asal Kabupaten Klaten yang ditetapkan oleh Provinsi Jawa Tengah. Selama ini penempatan transmigrasi Kabupaten Klaten masih tergantung dengan quota dan anggaran dari Provinsi Jawa Tengah

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran pengembangan ketransmigrasian yang didukung dengan program Pengembangan Wilayah Transmigrasi, dan program Transmigrasi Lokal.

Permasalahan :

- a. Minimnya minat calon transmigrasi, sekalipun fasilitasi dan pembekalan dari pemerintah cukup;
- b. Penempatan calon transmigrasi itupun harus Provinsi yang menentukan quotanya.
- c. Kurangnya sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait, dalam pelaksanaan penjangkauan sampai penempatan transmigrasi; dan
- d. Belum optimalnya sarana informasi layanan ketransmigrasian yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas.

Solusi :

- a. Peningkatan sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait layanan ketransmigrasian; dan
- b. Peningkatan sarana informasi layanan ketransmigrasian yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas.

3.3 Akuntabilitas Anggaran*)

Potensi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah pada tahun 2018 direncanakan sebesar Rp.2.545.432.179.217,- (*dua trilyun lima ratus empat puluh lima milyar empat ratus tiga puluh dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tujuh belas rupiah*), dan terealisasi sebesar Rp.2.577.944.813.955,42,- (*dua trilyun lima ratus tujuh puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu sembilan ratus lima puluh lima koma empat puluh dua rupiah*), atau melebihi target sebesar Rp.32.512.634.738,42 (*tiga puluh dua milyar lima ratus dua belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan koma empat puluh dua rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2018 direncanakan sebesar Rp.373.770.433.500, - (*tiga ratus tujuh puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah*), dan teralisasi sebesar Rp.395.867.927.955,42 (*tiga ratus sembilan puluh lima milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh lima koma empat puluh dua rupiah*), atau melampaui target sebanyak Rp.22.097.494.455,42 (*dua puluh dua milyar sembilan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus lima puluh lima koma empat puluh dua rupiah*).

1.2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan pada tahun 2018 direncanakan sebesar Rp.1.662.130.955.717,- (*satu trilyun enam ratus enam puluh dua milyar seratus tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah*), dan terealisasi sebesar Rp.1.652.127.767.661,- (*satu trilyun enam ratus lima puluh dua milyar seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh satu rupiah*) atau 99,40%.

1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2018 direncanakan sebesar Rp.500.530.790.000,- (*lima ratus milyar lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah*), dan terealisasi sebesar Rp.520.049.118.339,- (*lima ratus dua puluh milyar empat puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah*) atau melebihi target sebanyak Rp.20.418.330.339,- (*dua puluh milyar empat ratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah*).

Sedangkan potensi belanja daerah sebagai berikut:

2. Belanja Daerah

Mengingat potensi pendapatan dan meningkatnya kebutuhan pembangunan, namun Belanja Daerah pada tahun 2018 sebesar Rp.2.973.118.885.977,- (*dua trilyun sembilan ratus tujuh puluh tiga milyar seratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuhpuluh*) dengan perincian sebagai berikut:

2.1. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung pada tahun 2018 sebesar Rp.1.954.442.601.856,- (*satu trilyun sembilan ratus lima puluh empat milyar empat ratus empat*

puluh dua juta enam ratus satu ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah), dan terealisasi sebanyak Rp. 1.750.134.706.110,- (satu trilyun tujuh ratus lima puluh milyar seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam ribu seratus sepuluh rupiah).

2.2. Belanja Langsung

Belanja Langsung (mendanai program dan kegiatan) pada tahun 2018 direncanakan sebanyak Rp.1.018.676.084.121,98 (*satu trilyun delapan belas milyar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan puluh empat ribu seratus dua puluh satu koma sembilan puluh delapan rupiah*), dan terealisasi sebanyak Rp.859.618.219.315,88 (*delapan ratus lima puluh sembilan milyar enam ratus delapan belas juta dua ratus sembilan belas ribu tiga ratus belas koma delapan puluh delapan rupiah*).

Untuk menjaga keseimbangan sistem penganggaran daerah langkah yang diperlukan adalah menyusun kebijakan pembiayaan daerah dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah pada tahun 2018 direncanakan sebesar Rp.455.895.506.760,88,- (*empat ratus lima puluh lima milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus enam tujuh ratus enam puluh koma delapan puluh delapan rupiah*).
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada tahun 2018 direncanakan sebesar Rp.27.999.000.000,- (*dua puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah*), dan terealisasi sebanyak Rp.27.249.000.000,- (*dua puluh tujuh milyar dua ratus empat puluh sembilan juta rupiah*) atau kurang sebanyak Rp.750.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh juta Rupiah*).

**) catatan: data per Jumat, 15 Maret 2019.*

Tabel 3.104

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja Utama					Program	Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal	Persentase sekolah dasar yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	%	48,00	61,05	127,19	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.092.800.000	469.548.304	42,97
		Persentase sekolah menengah pertama yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	%	80,00	82,00	102,44	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	23.009.821.900	16.412.756.639	71,05
							Pendidikan Non Formal	215.000.000	187.183.675	87,06
							Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5.305.000.000	4.880.270.500	91,99
							Pengembangan Budaya Baca dan Minat Baca	220.000.000	213.515.000	97,05
							Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	582.651.000	484.273.839	83,12
							Manajemen Pelayanan Pendidikan	1.405.000.000	1.008.866.000	71,81
2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan menurunnya angka kematian , angka kesakitan dan kecacatan	Kasus kematian Ibu	Kasus	17	13	123,53	Upaya Kesehatan Masyarakat	9.022.525.720	7.112.695.005	78,83

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja Utama					Program	Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Angka Kematian Bayi	per 1000 KH	10,13	10,7	94,37	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	669.150.000	476.147.120	71,16
		Angka kematian Balita	per 1000 KH	15,7	12,67	86,23	Obat dan Perbekalan Kesehatan	4.913.243.000	4.662.376.012	94,89
		Prevalensi gizi buruk (BB/U)	%	0,73	0,56	123,29	Pengawasan Obat dan Makanan	55.000.000	54.995.000	99,26
							Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	492.914.500	478.458.000	97,07
							Perbaikan Gizi Masyarakat	608.821.625	491.359.750	80,71
							Pengembangan Lingkungan Sehat	7.700.123.000	7.448.048.290	96,73
							Standarisasi Pelayanan Kesehatan	50.000.000	49.998.000	100
							Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	10.161.222.000	9.686.505.850	95,33
							Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan prasarana sarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya	15.971.264.1555	15.102.056.732	94,56
							Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/Rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/Rumah sakit mata	900.000.000	539.480.865	59,94

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja Utama					Program	Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3	Meningkatnya pemanfaatan pelayanan Kerumahsakitkan oleh masyarakat dan menurunnya angka kematian di Rumah Sakit.	Usia Harapan Hidup	Tahun	76,62	76,77	100,20	Pelayanan Kesehatan	36.591.248.581	32.270.720.940	88,19
4	Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM	Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	83	70,66	85,13	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komonitas Adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	100.000.000	35.901.000	35,90
		Persentase penguatan kapasitas PSKS	%	96	96	100	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1.715.100.000	1.150.479.974	67,68
		Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	%	13,3	14,32	107,67	Pembinaan Eks. Penyandang Penyakit Sosial	75.000.000	54.950.500	73,27
							Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	893.600.000	859.035.300	96,13
5	Menurunnya angka kelahiran (<i>Total Fertility Rate</i>)	Angka Kelahiran (<i>Total Fertility Rate</i>) / TFR	Angka	2,16	1,91	111,60	Keluarga Berencana	8.029.746.000	6.311.884.070	78,61
							Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja	21.950.000	19.740.000	89,93
							Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB Mandiri	298.130.000	289.936.168	97,16

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja Utama					Program	Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6	Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga.	Persentase Kenaikan Prestasi Pemuda	%	10	12	120	Peningkatan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan	450.000.000	365.697.790	81,27
		Persentase Kenaikan Prestasi Olahraga	%	5	5	100	Pembinaan dan Pemasyaratan Olahraga	1.350.000.000	1.291.967.775	95,70
7	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya	Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya	%	6	3,2	54	Pengelolaan Kekayaan Budaya	2.636.000.000	2.288.108.613	86,80
							Pengembangan Nilai Budaya	130.000.000	112.921.300	86,86
		Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	10	14,3	143	Pengelolaan Keragaman Budaya	155.000.000	94.312.750	61,00
8	Meningkatnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan	Persentase kenaikan kunjungan masyarakat	%	5	65,79	1.315,8	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	582.651.000	484.273.839	83,12
9	Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	82,06	74	90,18	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.965.000.000	4.781.195.547	96,30
							Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	5.429.367.500	3.513.384.491	64,71

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja Utama					Program	Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
10	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Opini	WDP	WDP	100	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	12.791.337.000	9.990.994.192	78
11	Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja sekretariat DPRD	Persentase Raperda yang disahkan tepat waktu	%	85	93,10	109,53	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	34.238.929.000	26.884.311.166	78,52
12	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Tingkat Konsistensi dan ketepatan waktu Perencanaan	%	100	95	95	Perencanaan Pembangunan Daerah	1.585.000.000	1.294.718.355	81,69
							Perencanaan Pembangunan Ekonomi	475.000.000	410.879.587	86,50
							Perencanaan Sosial dan Budaya	505.000.000	479.635.087	94,98
							Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	463.000.000	439.391.875	94,90
13	Meningkatnya tata kelola arsip SKPD	Persentase kenaikan SKPD mengelola arsip secara baku	%	5	11,72	234,4	Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	187.500.000	172.313.350	91,90
							Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	237.509.000	189.628.700	79,84
14	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan dan akuntabel	Persentase penyelenggaraan pemerintah desa yang profesional, transparan dan akuntabel	%	46	48	104	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa / Kelurahan	569.622.750	503.705.866	88
							Tata Kelola Pemerintah Desa	800.751.450	467.290.901	58

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja Utama					Program	Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
15	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Level Maturitas SPIP	Tingkat	2	2	100	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	5.064.389.000	3.995.265.857	78,89
		Level Kapabilitas APIP	Tingkat	3	2	66,67	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Tata Laksana Perangkat Daerah	1.035.000.000	773.864.215	74,77
		Nilai Akuntabilitas Kinerja pemerintah	Angka	64 (B)	60,33 (B)	94,27	Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	977.842.000	686.481.379	70,20
16	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan otonomi daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Angka	2,8	3,09	110,36	Peningkatan Kinerja Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	1.825.000.000	1.366.820.114	74,89
							Peningkatan Kerjasama Daerah	150.000.000	122.467.264	82
							Pengembangan Wilayah Perbatasan	360.000.000	345.509.882	96
							Peningkatan Tata Kelola Kecamatan	90.000.000	74.154.980	82,39
							Pengembangan Komunikasi Informatika Mass Media	1.606.767.000	1.489.376.387	92,69
							Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	155.000.000	125.881.060	81

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja Utama					Program	Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
17	Meningkatnya koordinasi penataan peraturan perundang undangan serta bantuan hukum dan HAM	Persentase tercapainya penyusunan produk hukum dan penanganan perkara	%	85	90	105	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	2.297.000.000	1.876.871.278	81,71
		Indeks kabupaten peduli HAM	%	75	234	175,5	Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum	658.000.000	559.562.500	85,04
18	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan pembangunan	Persentase kesesuaian capaian pelaksanaan pembangunan (fisik dan keuangan) dengan target (rencana)	%	90	87,78	97,53	Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	977.842.000	686.481.379	70,2
19	Terwujudnya pelayanan pengadaan barang dan jasa yang kredibel	Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang sesuai regulasi	%	100	100	100	Peningkatan Koordinasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (Pelayanan Pemilihan penyedia barang dan jasa)	285.259.000	209.322.538	73,38
20	Meningkatnya fasilitasi koordinasi bidang kehumasan dan keprotokolan	Persentase publikasi kebijakan dan kegiatan kepala daerah	%	94	94	100	Kerjasama dengan Mass Media	1.862.470.000	1.615.447.178	86,74
		Persentase dokumentasi kegiatan kepala daerah	%	94	98	102,1				
		Persentase pelayanan keprotokolan kegiatan kepala daerah	%	94	95	101,06				

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja Utama					Program	Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
21	Meningkatnya fasilitasi dan pengawalan kebijakan daerah bidang perekonomian	Tingkat Inflasi YoY	%	3,5 (± 1)	2,39	68,29	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	110.500.000	106.126.500	96,04
22	Meningkatnya koordinasi kesejahteraan rakyat	Persentase keterlibatan <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesra	%	90	90	100	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	21.419.000	19.453.000	90,82
23	Meningkatnya ketersediaan Pangan Beragam, bergizi seimbang dan meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	12,25	10,98	89,68	Peningkatan Ketahanan Pangan	5.199.000.000	4.397.136.717	84,58
							Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Masyarakat	775.000.000	689.420.000	88,96
							Peningkatan Produksi Perkebunan	2.850.000.000	2.272.656.119	80
							Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	1.350.000.000	938.055.020	69,49
							Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	150.000.000	147.942.675	98,62
24	Meningkatnya peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG di desa dalam penanggulangan kemiskinan	Persentase desa yang memiliki LEM, LED dan Posyantek	%	35	35	100	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan	892.710.000	683.867.706	76,61
							Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	382.000.000	300.772.110	79,16

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja Utama					Program	Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
25	Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisataan	Persentase Peningkatan PAD dari sektor Pariwisata	%	25	47,50	190	Pengembangan Kemitraan	555.000.000	538.539.908	97,03
							Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1.005.000.000	986.168.787	98,13
							Pengembangan Destinasi Pariwisata	4.171.207.000	659.557.420	15,81
26	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	18,94	17,88	94,40	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	300.000.000	210.777.100	70,26
		Persentase UMKM yang memiliki daya saing	%	9	8,99	99,88	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	676.000.000	628.562.346	92,98
							Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	325.000.000	290.027.600	89,24
							Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	560.000.000	154.585.800	27,60
							Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	13.005.000.000	12.112.360.936	93,14
							Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan	400.000.000	388.759.600	97,19
27	Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan daerah	Persentase inovasi yang diterapkan	%	72,73	60	82,56	Program penelitian dan pengembangan	600.000.000	513.206.634	85,53

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja Utama					Program	Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
28	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor penanaman modal	Rasio daya serap tenaga kerja (PMDN/PMA):					Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	295.000.000	258.201.671	87,53
		PMDN	%	417	131	31,41				
		PMA	%	294	264	89,79				
		Persentase pertumbuhan realisasi investasi (PMDN/PMA):								
		PMDN	%	1,98	1078	54.444,44				
		PMA	%	2,45	52	2122,45				
29	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor Ketenagakerjaan	Rasio penduduk yang bekerja	%	1,03	0,87	84,47	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	830.000.000	743.037.850	89,52
		Angka partisipasi angkatan kerja	%	69	73,58	106,64	Peningkatan Kesempatan Kerja	275.000.000	193.822.351	70,48
30	Meningkatnya perlindungan sektor ketenagakerjaan	Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	%	87,60	82,59	94,28	Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	169.000.000	154.093.926	91,18
31	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas, dan daya saing sektor Perindustrian	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	34,86	35,94	103,10	Pengembangan industri kecil dan Menengah	759.560.000	627.897.500	82,67
		Persentase IKM yang memiliki daya saing	%	5,50	1,80	32,73	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	200.000.000	182.814.000	91,41
32	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyarakat	Indeks layanan infrastruktur	Indeks	29,42	58,61	199,22	Pembangunan Jalan dan Jembatan	196.851.000.000	175.449.453.340	89,13

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja Utama					Program	Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
							Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	20.833.000.000	16.600.610.051	79,68
							Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Perkotaan	33.863.068.000	21.598.307.650	63,78
33	Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas dan penyelenggaraan angkutan	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perhubungan	Tingkat	45,87	43,58	95,01	Peningkatan Pelayanan Angkutan	447.400.000	393.007.200	87,84
34	Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Indeks kualitas perumahan dan kawasan pemukiman	Indeks	41,06	34,08	83	Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	45.545.000.000	39.340.147.915	86,38
							Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	8.925.000.000	7.885.311.614	88,35
							Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	11.246.000.000	9.656.027.200	85,86
							Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung	69.400.000.000	61.681.193.858	88,88
35	Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai dengan konsep tata ruang	Ketaatan terhadap RTRW	%	78,98	78,98	100	Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang	50.000.000	27.513.958	55,03
36	Terjaganya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas air	Indeks	30,68	18,28	59,58	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	1.591.291.000	1.325.254.625	83,28
		Indeks kualitas udara	Indeks	74,68	83,3	111,54	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	1.160.000.000	1.016.051.650	87,59
		Indeks tutupan vegetasi (lahan)	Indeks	48,82	42,54	87,14				

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja Utama					Program	Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
37	Terwujudnya pengurangan kerentanan resiko bencana	Kelas Indeks kapasitas bencana	Kelas Indeks	Sedang (119)	Sedang (123,20)	103,53	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	944.000.000	742.937.450	78,70
							Penanganan Darurat Bencana	1.511.000.000	913.386.391	60,45
							Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	150.000.000	129.724.710	86,46
38	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap politik dan demokrasi	Indeks demokrasi	Indeks	75	70,85	94,47	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	370.000.000	312.450.000	84,45
							Peningkatan dan Pembinaan Kehidupan Sosial Politik	585.000.000	503.064.100	85,99
39	Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan kehidupan sosial budaya	Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan kehidupan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan)	Klpk	49	49	100	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	731.100.000	624.351.336	85,40
							Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga	1.003.143.250	971.070.426	96,80
							Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	892.710.000	683.867.706	76,61
40	Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	Indeks ketertiban masyarakat	Indeks	95	92,20	97,05	Pemeliharaan ketentraman masyarakat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	10.000.000	8.291.000	82,91

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja Utama					Program	Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
41	Meningkatnya kapasitas perempuan, perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	60,16	59,60	99,07	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	90.000.000	82.773.812	91,97
		Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)	Kelas	Nidya (750)	Madya (650)	86,67	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	44.000.000	43.128.000	98,02
42	Meningkatnya kualitas layanan perhubungan	Indeks kepuasan layanan perhubungan	Indeks	79,02	78,95	99,92	Peningkatan Pelayanan Angkutan	447.400.000	393.007.200	87,84
43	Meningkatnya pelayanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Indeks	79,52	80,52	101,26	Penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah	21.000.000	4.306.900	20,51
44	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas	Indeks kepuasan layanan masyarakat	Indeks	80	82,74	103,45	Penataan Administrasi Kependudukan	4.878.816.000	4.208.238.527	90,69
45	Pengembangan ketransmigrasian	Persentase besaran peningkatan minat transmigrasi	%	40,50	-80	-197,05	Pengembangan Wilayah Transmigrasi	218.000.000	187.069.385	85,81
							Transmigrasi Lokal	32.000.000	24.775.000	74,42
Jumlah Anggaran Prioritas I (program untuk membiayai visi dan misi Bupati)								796.401.249.831	551.421.809.008	69,24
Jumlah Belanja Langsung								1.018.676.084.121,98	859.618.219.315,88	84,39
Jumlah Belanja Tidak langsung								1.954.442.601.856	1.750.134.706.110	89,55
Jumlah Total Belanja Daerah								2.973.118.685.977,98	2.609.752.925.425,88	87,78

3.4 Efektifitas Sumber Daya

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 ditetapkan 45 (empat puluh lima) sasaran strategis dengan 67 (enam puluh tujuh) Indikator Kinerja Sasaran yang terdiri dari: 58 (lima puluh delapan) indikator yang sifatnya progresif, dan 9 (sembilan) indikator yang sifatnya represif.

Selanjutnya untuk mengimplementasikan RPJMD, telah ditetapkan pula Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten tahun 2018, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2018 tentang APBD Kabupaten Klaten Tahun 2018 tercatat sebanyak 173 program dengan 987 kegiatan. Realisasi fisik tercapai 87,78% dari target rencana. Dukungan dana untuk melaksanakan pembangunan dianggarkan sebanyak Rp.1.018.676.084.121,98 dan terserap sebesar Rp.859.618.219.315,88 (atau 84,39%).



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Klaten Tahun 2018 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja.

Sehingga LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2018 secara umum merupakan gambaran penyelenggaraan pemerintah berazaskan: tanggung jawab negara, kesinambungan dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik dan otonomi daerah.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 45 (empat puluh lima) sasaran strategis dengan 67 (enam puluh tujuh) Indikator Kinerja Sasaran yang terdiri dari: 58 (lima puluh delapan) indikator yang sifatnya progresif, dan 9 (sembilan) indikator yang sifatnya represif. Dari masing-masing indikator diperoleh hasil:

A. Indikator Progresif, dengan hasil:

- a. Sebanyak 46 (enam puluh enam) Indikator Kinerja sasaran atau sebanyak 79,31% dengan Kriteria ***Sangat Tinggi***;
- b. Sebanyak 7 (tujuh) atau sebanyak 12,07% dengan Kriteria ***Tinggi***;
- c. Sebanyak 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran atau sebanyak 1,72% dengan Kriteria ***Sedang***;
- d. Sebanyak 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran atau sebanyak 1,72% dengan Kriteria ***Rendah***; dan
- e. Sebanyak 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran atau sebanyak 5,17% dengan Kriteria ***Sangat Rendah***.

3. *Indikator Regresif*, dengan hasil:

Indikator Regresif sebanyak 9 (sembilan) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 100% dengan Kriteria **Baik (Berhasil Menekan)**.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Memedomani ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 wajib kiranya hasil LKjIP tahun berkenaan dipakai sebagai *bahan penyusunan atau evaluasi kebijakan, rencana, dan/atau program* terkait dengan : (a) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-Perangkat Daerah), dan (b) Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu, maupun yang berpartisipasi aktif dalam mewujudkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2018 diucapkan terima kasih, dengan harapan semoga mampu mewujudkan **Visi Daerah : Maju, Mandiri dan Berdaya Saing**.

Klaten, 28 Maret 2019

BUPATI KLATEN



SRI MULYANI

LAMPIRAN I

Penghargaan dan Piagam Penghargaan Kabupaten Klaten Tahun 2018

1. Piagam Penghargaan “ABIWARA PARIWISATA” Gubernur Jawa Tengah kepada UMBUL PONGGOK Kabupaten Klaten sebagai Peringkat IV Kategori Daya Tarik Wisata Tingkat Provinsi Jawa Tengah;
2. Piagam Penghargaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Atas Keberhasilan Dalam Mengurangi Risiko Bencana Banjir Melalui Aksi “Inisiasi dan Pembinaan Komunitas Peduli Sungai di Kabupaten Klaten Jawa Tengah”.
3. Penghargaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi yang telah Terintegrasi dengan Sistem JDIHN; dan
4. Penghargaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada Pemerintah Kabupaten Klaten Sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia.



GUBERNUR JAWA TENGAH

PIAGAM PENGHARGAAN

NOMOR: 0025 / 0017146

ABIWARA PARIWISATA

Diberikan Kepada

UMBUL PONGGOK

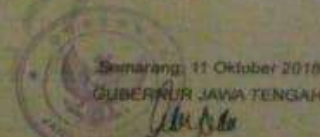
KABUPATEN KLATEN

Sebagai

PERINGKAT IV DAYA TARIK WISATA

(DI KELOLA SWASTA)

Pada Acara Citra Pariwisata Award Tingkat Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018



Semarang, 11 Oktober 2018

GUBERNUR JAWA TENGAH

H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.P.



BNPB

Piagam Penghargaan

Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Memberikan Penghargaan Kepada:

BUPATI KLATEN

Atas Keberhasilannya yang Luar Biasa
dalam Mengurangi Risiko Bencana Banjir
Melalui Aksi:

*Inisiasi dan Pembinaan Komunitas Peduli Sungai
di Kabupaten Klaten - Jawa Tengah*

Yogyakarta, 26 November 2018

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana

W. Bampangilei
Willem Bampangilei



Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia

memberikan

PENGHARGAAN

kepada

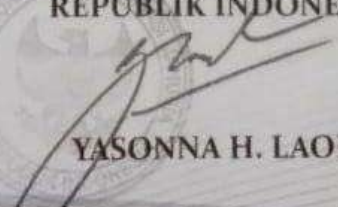
**Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Klaten**

sebagai

**Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi
yang telah terintegrasi dengan Sistem JDIHN**

dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden RI No. 33 Tahun 2012
tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN)

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**


YASONNA H. LAOLY

ALWAYS THE BEST



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

MENGANUGERAHKAN

PENGHARGAAN

KEPADA

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

SEBAGAI KABUPATEN PEDULI HAK ASASI MANUSIA PADA TAHUN 2017

JAKARTA, 5 DESEMBER 2018

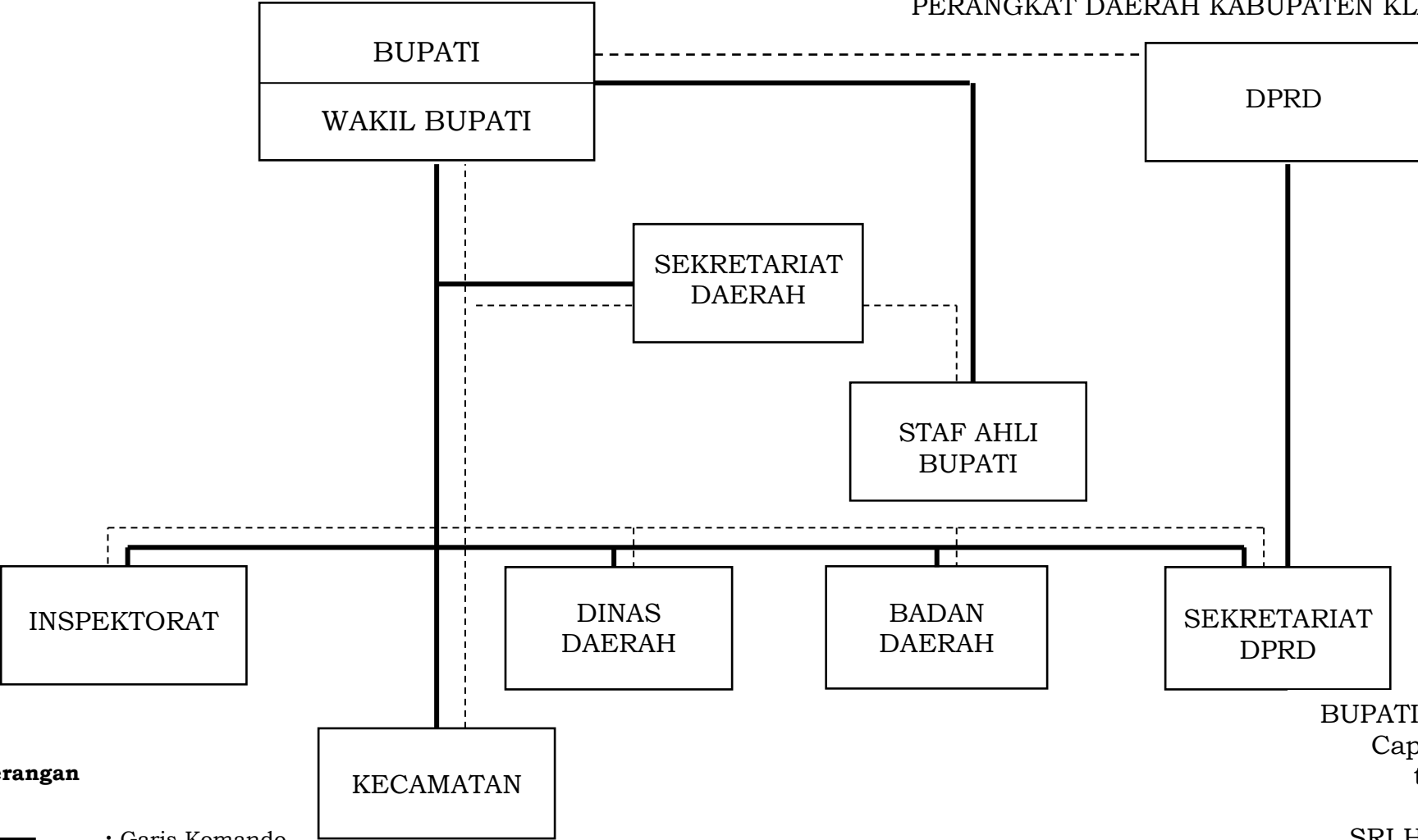
YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I

Struktur Pemerintah Kabupaten Klaten

BAGAN ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN KLATEN

PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 36 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KLATEN



Keterangan
 — : Garis Komando
 - - - : Garis Koordinasi

BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI HARTINI